



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2024.

Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang investasi dan keberlanjutan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi ke depan.

Jakarta, 3 April 2024

Direktur Usaha dan Investasi



Catur Sarwanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama Tahun 2024 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP selama periode triwulan I Tahun 2024, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP melakukan pengukuran terhadap Kegiatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan strategis meningkatkan nilai investasi dan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan.

Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Direktorat Usaha dan Investasi yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Direktur Usaha dan Investasi dengan Direktur Jenderal PDSPKP, yang terdiri atas 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja.

Dari 17 indikator kinerja tersebut sebanyak 6 (enam) telah dilakukan pengukuran pada Triwulan I Tahun 2024, sedangkan indikator kinerja lainnya belum dapat diukur karena tidak ada target capaian pada triwulan I. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut ke-6 indikator kinerja telah mencapai target Triwulan I tahun 2024. Dengan capaian dimaksud, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP pada Triwulan I Tahun 2024 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 107,53%.

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Dari 17 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 10 indikator kinerja bersifat tahunan, 1 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 6 indikator kinerja bersifat triwulanan.
2. Sebanyak 10 indikator kinerja dimaksud yaitu (1) Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi, (2) Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan

kredit program, (3) Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan, (4) Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi, (5) Nilai penilaian mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi, (6) Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi, (7) Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi, (8) Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi, (9) Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi dan (10) Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi.

3. Sebanyak 1 indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP.
4. Sedangkan 6 indikator kinerja yang bersifat triwulanan yaitu (1) Dokumen Peluang Investasi yang Reasy to Offer, (2) Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan, (3) Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya, (4) Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina, (5) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha, (6) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir.
5. Pencapaian realisasi indikator kinerja triwulan I atas 6 indikator yang bersifat triwulanan adalah (1) Dokumen Peluang Investasi yang Reasy to Offer, pada triwulan I tidak ada target yang ditetapkan, dikarenakan pada periode ini kegiatan yang dilaksanakan baru tahap identifikasi; (2) Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan, teralisasi 1 kegiatan promosi dari target 1 kegiatan atau dengan kata lain tercapai 100%; (3) Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya, teralisasi 4 lembaga dari target 4 lembaga atau dengan kata lain tercapai 100%; (4) Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina, teralisasi 150 pelaku usaha dari target 150 pelaku usaha atau dengan kata lain tercapai 100%; (5) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha, teralisasi 150 UMKM dari target 150 UMKM atau dengan kata lain tercapai 100%; (6) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir, teralisasi 26 UMKM dari target 26 UMKM atau dengan kata lain tercapai 100%;.

Pada Triwulan I Tahun 2024, anggaran Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Direktorat Usaha dan Investasi adalah sebesar Rp22.723.500.000,-. Dari pagu anggaran awal tersebut, terdapat blokir sebesar Rp4.916.515.000,-, sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp17.806.985.000,-. Penyerapan anggaran Direktprat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.105.090.448,- atau setara dengan 13,66% terhadap total pagu anggaran awal atau 17,44% terhadap pagu anggaran pasca blokir.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Direktorat Usaha dan Investasi yang telah dicapai selama triwulan I Tahun 2024, serta rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya, agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing Indikator Kinerja diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, agar kinerja dapat dijalankan lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 2

1.3. Tugas dan Fungsi 2

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia 4

1.5. Permasalahan Utama 6

1.6. Sistematika Penyajian 7

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 9

2.1. Rencana Strategis 9

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 16

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 18

3.1. Capaian Kinerja 18

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja 19

3.2.1. Sasaran Strategis 1 21

_____ Meningkatkan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan 21

3.2.2. Sasaran Strategis 2 24

_____ Tersedianya Peluang Investasi Yang *Ready to Offer* 24

3.2.3 Sasaran Strategis 3 29

_____ Terlaksananya promosi udaha dan investasi 29

3.2.4 Sasaran Strategis 4 33

_____ Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan 33

3.2.5 Sasaran Strategis 5 49

_____ Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha 49

3.2.6 Sasaran Strategis 6 78

_____ Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	78
3.2.7 Sasaran Strategis 7	81
_____ Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi.....	81
BAB IV. PENUTUP	96
4.1. Kesimpulan	96
4.2. Rekomendasi.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Usaha dan Investasi..... 16

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan IV Tahun 2023...19

Tabel 3. 2 khtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada Triwulan I Tahun 2024.....22

Tabel 3. 3 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program Triwulan I Tahun 202423

Tabel 3. 4 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Peluang investasi Yang Ready to Offer Triwulan I Tahun 202424

Tabel 3. 5 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP Triwulan I 202429

Tabel 3. 6 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga Usaha yang Ditingkatkan Kapasitasnya Triwulan I 2024.....34

Tabel 3. 7 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan pada Triwulan I Tahun 202450

Tabel 3. 8 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha Triwulan I Tahun 202458

Tabel 3. 9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi (UMKM) pada Triwulan I Tahun 202470

Tabel 3. 10 Ikhtisar Pencapaian Indikator Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 202478

Tabel 3. 11 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024.....81

Tabel 3. 12 Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 202482

Tabel 3. 13 Ikhtisar Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan I Tahun 202483

Tabel 3. 14 Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024.....84

Tabel 3. 15 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2024.....	85
Tabel 3. 16 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan I Tahun 2024.....	87
Tabel 3. 17 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan IV Tahun 2024	88
Tabel 3. 18 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024.....	89
Tabel 3. 19 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024.....	90
Tabel 3. 20 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang).....4

Gambar 1. 2 Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan5

Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin5

Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan6

Gambar 3. 1 Dashboard Nilai NPSS Direktorat Usaha dan Investasi..... 18

Gambar 3. 2 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi22

Gambar 3. 3 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program23

Gambar 3. 4 Lokasi yang siap ditawarkan ke investor dengan luas 5.000 m226

Gambar 3. 5 Lokasi yang siap ditawarkan ke investor dengan luas 7.000 m226

Gambar 3. 6 Koordinasi dan Persiapan Penyusunan Dokumen Peluang Investasi yang Ready to Offer Komoditas Tuna di Kabupaten Biak Numfor27

Gambar 3. 7 Indonesia Marine and Fisheries Business and Investment Forum (IMFBF) 202430

Gambar 3. 8 Pendampingan rencana investasi komoditas rumput laut dengan PT Indorama31

Gambar 3. 9 Pendampingan rencana investasi PT Krueng Triton Indonesia33

Gambar 3. 10 Rapat Inisiasi Pembentukan Badan Usaha Kabupaten Jepara35

Gambar 3. 11 Rapat Koordinasi Permohonan Data dan Kelompok36

Gambar 3. 12 Pendampingan Penguatan Kelembagaan usaha hasil KP di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak37

Gambar 3. 13 Rapat Inisiasi Pembentukan Lembaga Usaha hasil KP di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Sampang37

Gambar 3. 14 Rapat Inisiasi Pembentukan Badan Usaha Kabupaten Indramayu38

Gambar 3. 15 Rapat Pra-Pembentukan Badan Usaha di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Indramayu39

Gambar 3. 16 Rapat Inisiasi Pembentukan Badan Usaha Kabupaten Boyolali dan Surakarta40

Gambar 3. 17 Rapat Inisiasi Pembentukan Lembaga Usaha Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Tulungagung41

Gambar 3. 18 Rapat Pra Pembentukan Lembaga Usaha KP di Kota Surakarta dan Kabupaten Gunung Kidul	43
Gambar 3. 19 Inisiasi Pembentukan Lembaga Usaha Kabupaten Karawang dan Kabupaten Sragen.....	44
Gambar 3. 20 Penguatan Kelembagaan Usaha Hasil KP di Semarang	45
Gambar 3. 21 Rapat Pra pembentukan lembaga usaha hasil KP dalam rangka peningkatan kelembagaan di Kabupaten Karawang	46
Gambar 3. 22 Rapat Inisiasi Pembentukan Badan Usaha Di Kabupaten Mojokerto	47
Gambar 3. 23 Persiapan Inisiasi Pembentukan Badan Usaha Di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Banyuwangi.....	48
Gambar 3. 24 Dokumentasi Kegiatan Penumbuhan dan Pembinaan Wirausaha Kelautan dan Perikanan.....	51
Gambar 3. 25 Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Baru, serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja.....	53
Gambar 3. 26 Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Bersih Pantai dan Lingkungan Kawasan Kampung Nelayan Modern (KALAMO) Pulau Pasaran.....	54
Gambar 3. 27 Dokumentasi Kegiatan Peresmian Kampung Nelayan Modern (KALAMO) Pulau Pasaran	56
Gambar 3. 28 Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan di kota Kediri, Kota Kupang, dan Kota Pinrang	57
Gambar 3. 29 Fasilitasi Akses Permodalan di Kota Semarang Jawa Tengah	68
Gambar 3. 30 Fasilitasi Akses Permodalan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah	69
Gambar 3. 31 Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Gresik	72
Gambar 3. 32 Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Purwakarta.....	73
Gambar 3. 33 Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Serang, Banten ..	74
Gambar 3. 34 Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	75
Gambar 3. 35 Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.....	76
Gambar 3. 36 Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 31 Maret 2024	86

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan melalui program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan dalam rangka mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional dengan menerapkan sistem industri yang efisien dan nir-limbah. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat

sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP menyusun Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan IV Tahun 2023. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan IV Tahun 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

Adapun Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2023 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

1.3. Tugas dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi agar terwujud organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, dan adanya persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1136/M.KT.01/2020, tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tanggal 25 September 2020, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya penetapan tersebut, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Usaha dan Investasi;
- c. Direktorat Logistik;
- d. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu; dan
- e. Direktorat Pemasaran.

Selanjutnya dalam Pasal 99 Peraturan Menteri tersebut, Direktorat Usaha dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan keberlanjutan usaha dan investasi meliputi pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan.

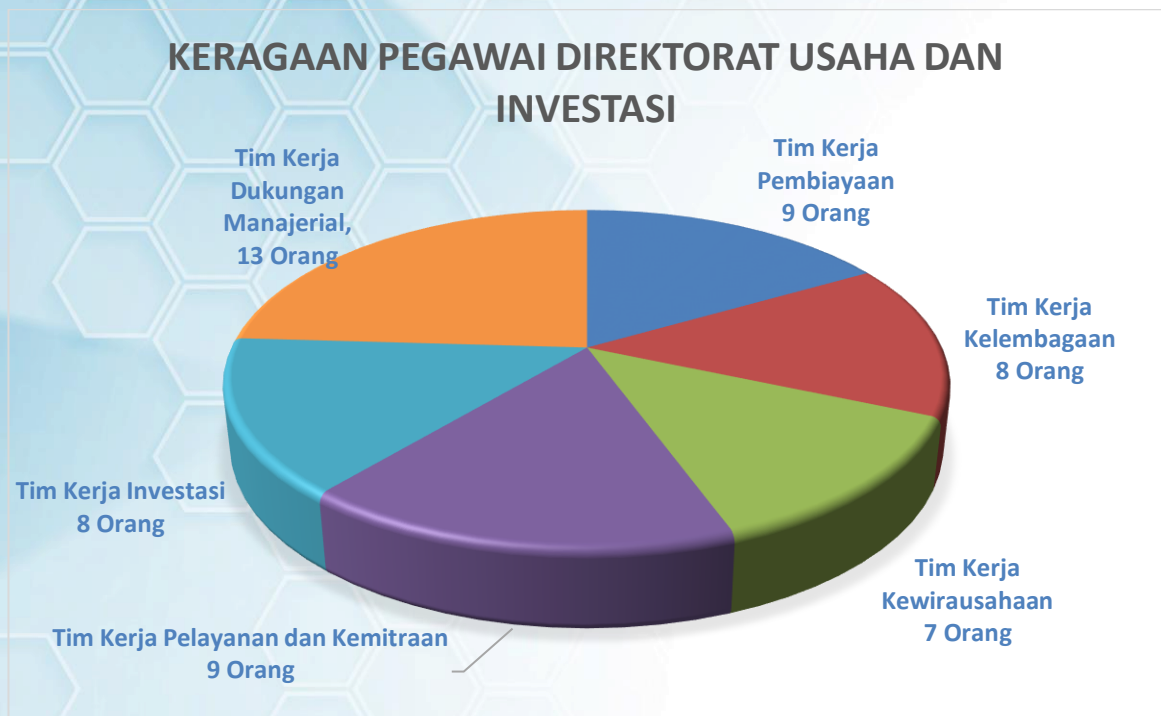
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Usaha dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia

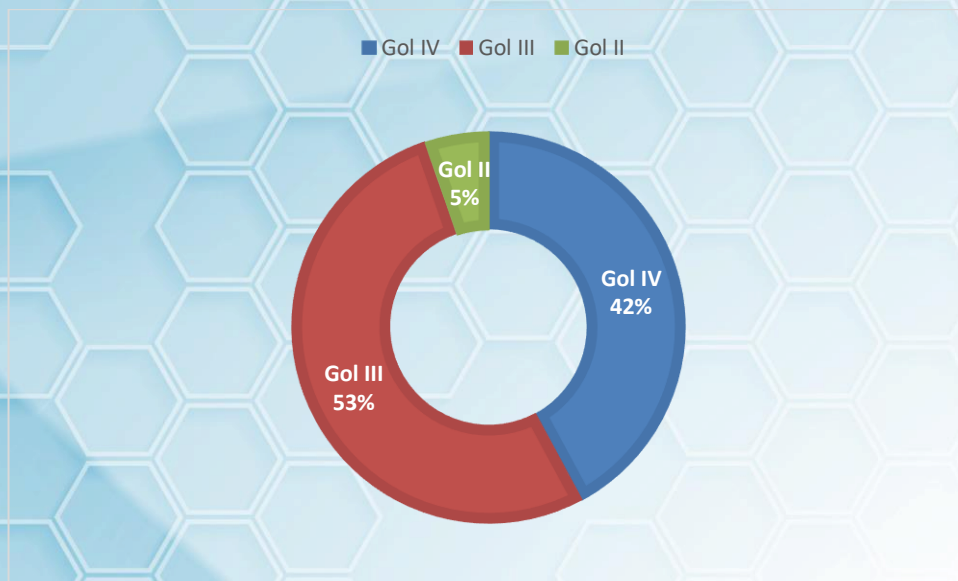
Jumlah sumber daya manusia atau pegawai Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 berjumlah 54 orang, yang terdiri atas 38 orang Aparatur Sipil Negeri (ASN), 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 3 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 3 orang Pegawai Jasa Langsung Perseorangan, yang tersebar di 6 Tim Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja, meliputi Direktur sebanyak 1 orang, Tim Kerja Investasi sebanyak 8 orang; Tim Kerja Pelayanan dan Kemitraan sebanyak 9 orang; Tim Kerja Pembiayaan sebanyak 9 orang; Tim Kerja Kewirausahaan 7; Tim Kerja Kelembagaan sebanyak 8 orang; dan Tim Kerja Dukungan Manajerial sebanyak 12 orang.



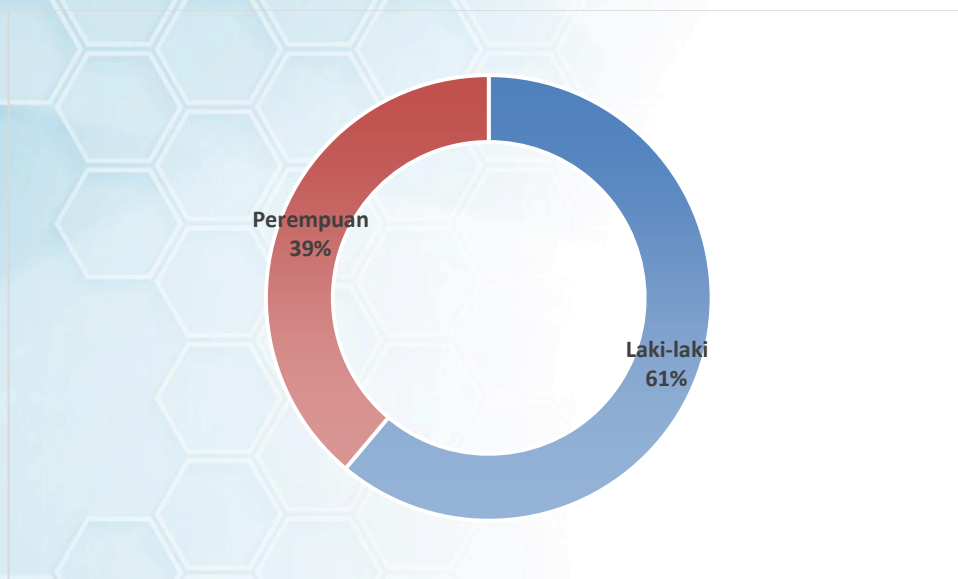
Gambar 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang)

2. Jumlah pegawai menurut golongan khusus ASN, meliputi golongan IV sebanyak 16 orang, golongan III sebanyak 20 orang, dan golongan II sebanyak 2 orang. Menurut golongannya, pegawai Direktorat Usaha dan Investasi terbanyak pada golongan III, yakni 53%.



Gambar 1. 2 Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan

- Jumlah pegawai menurut jenis kelamin, meliputi laki-laki sebanyak 28 orang, atau 55% dari total pegawai Direktorat Usaha dan Investasi, dan perempuan sebanyak 21 orang, atau 45% dari total pegawai Direktorat Usaha dan Investasi.



Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

- Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan, meliputi S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 21 orang, S1 sebanyak 22 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 6 orang dan SMP sebanyak 1 orang. Menurut tingkat pendidikannya, pegawai Direktorat Usaha dan Investasi terbanyak dengan tingkat pendidikan S1, yakni mencapai 41%.



Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan

1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pembangunan hilirisasi industri melalui upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk mengimbangi permintaan masyarakat dunia yang terus meningkat terhadap produk ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi.

Dari sisi pemanfaatan potensi sumberdaya, berbagai upaya untuk peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan perlu terus dilakukan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Disisi lain, kemudahan dalam berusaha bagi pelaku usaha mikro-kecil dan usaha menengah-besar, dan akses terhadap sumberdaya (modal, teknologi, sarpras, tenaga kerja) juga perlu mendapatkan perhatian. Pasca pandemi Covid-19 juga masih berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini turut mempengaruhi laju pertumbuhan investasi dan pembiayaan, utamanya bagi pelaku usaha mikro kecil. Untuk itu diperlukan upaya dan strategi yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini, agar kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi dapat dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan diantaranya:

1. Penyediaan informasi peluang investasi usaha di sektor kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan (*ready to offer*).
2. Pelayanan kemudahan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.
3. Penguatan korporasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dalam kerangka *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
4. Fasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
5. Fasilitasi akses pembiayaan dari lembaga keuangan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
6. Peningkatan literasi utamanya tentang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

1.6. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP selama Tahun 2024, termasuk didalamnya capaian kinerja pada Triwulan I 2024. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan I Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan I Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Usaha dan Investasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Usaha dan Investasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Usaha dan Investasi;

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Usaha dan Investasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Usaha dan Investasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Usaha dan Investasi untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran.**

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi menginduk pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEP-DJPDSKP/2021. Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 tersebut disusun sebagai tindak lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

2.1.1 Visi

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Untuk pembangunan nasional 2020-2024, Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah “terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Visi tersebut tidak lain merupakan Visi Presiden tahun 2020-2024 yang juga diacu sebagai Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”.

2.1.2 Misi

Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah menjalankan Misi Presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai misi pembangunan kelautan dan perikanan tahun

2020-2024 serta mendukung 5 (lima) Program Utama Presiden yang disampaikan dalam Pidato Pelantikan tanggal 9 Oktober 2019. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, dan Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Dari 4 (empat) Misi Presiden yang didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dapat mendukung 2 (dua) misi yaitu: **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing serta Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.**

2.1.3 Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, Ditjen PDSPKP merumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya investasi kelautan dan perikanan
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai investasi kelautan dan perikanan dari Rp5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2023;
 - b. meningkatnya pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,2 Triliun pada tahun 2023;
 - c. meningkatnya nilai kinerja logistik hasil perikanan
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai kinerja logistik hasil perikanan dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;
 - d. meningkatnya volume produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan volume produk olahan kelautan dan perikanan dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024;

e. meningkatnya konsumsi ikan

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan konsumsi ikan dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024;

f. meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024.

2. Melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP, dengan tujuan:

a. meningkatnya nilai PM PRB Ditjen PDSPKP Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai PM PRB Ditjen PDSPKP dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;

b. meningkatnya nilai IKPA lingkup Ditjen PDSPKP Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai IKPA Ditjen PDSPKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

2.1.4 Sasaran

Sasaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) sebagai suatu *outcome/impact* dari pelaksanaan program pengelolaan perikanan dan kelautan, program nilai tambah dan daya saing industri, serta program dukungan manajemen.

Adapun sasaran tersebut adalah:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

a. Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Nilai investasi kelautan dan perikanan meningkat dari Rp 5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2024;
- 2) Kinerja logistik hasil perikanan meningkat dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;
- 3) Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program meningkat dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,20 Triliun pada tahun 2024.

b. Sasaran: Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PDSPKP meningkat 4 (skala 1-5) pada tahun 2020 menjadi 5 (skala 1-5) pada tahun 2024.

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

a. Sasaran: Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah volume produk olahan kelautan dan perikanan berdaya saing meningkat dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024.

b. Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Nilai ekspor hasil perikanan meningkat dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024;
- 2) Konsumsi ikan meningkat dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024.

c. Sasaran: Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) meningkat dari 103,75 pada tahun 2020 menjadi 104,75 pada tahun 2024.

3. Program Dukungan Manajemen

Sasaran: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PDSPKP.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 2024;
- 2) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 82% pada tahun 2020 menjadi 86% pada tahun 2024;
- 3) Level maturitas SPIP Ditjen PDSPKP berada pada level 3 setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 4) Nilai kinerja PM PRB Ditjen PDSPKP meningkat dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;
- 5) Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP meningkat dari A (84) pada tahun 2020 menjadi A (84,75) pada tahun 2024;
- 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 7) Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP sebanyak 2 unit setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 8) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari Baik (88) pada tahun 2020 menjadi Baik (92) pada tahun 2024;
- 9) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP sebesar 1% setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 10) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas strategis lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 70% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 11) Batas tertinggi prosentasi nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PDSPKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP bernilai 1 (satu) setiap tahunnya pada tahun 2020- 2024.

2.1.5 Kebijakan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan KKP ke-3 yaitu membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan, Ditjen PDSPKP menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program
3. Meningkatkan kinerja logistik hasil perikanan
4. Meningkatkan produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing
5. Meningkatkan konsumsi ikan
6. Meningkatkan ekspor hasil perikanan

Dalam melaksanakan 6 (enam) arah kebijakan di atas, Ditjen PDSPKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Di samping itu, Ditjen PDSPKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital.

Adapun strategi pelaksanaan untuk kebijakan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Usaha dan Investasi adalah:

1. Arah kebijakan “meningkatkan investasi kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
 - a. promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan. Langkah operasional untuk mendukung strategi ini adalah terlaksananya promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan.
 - b. Tersedianya peluang investasi yang *Ready to Offer*. Strategi ini dilakukan melalui langkah-langkah operasional sebagai berikut:
 - 1) Identifikasi peluang usaha dan investasi dan
 - 2) penyusunan profil peluang investasi.

2. Arah kebijakan “meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
- a. Fasilitasi kemitraan usaha. Strategi ini dilakukan dengan cara mengembangkan kemitraan usaha, serta fasilitasi pelaku usaha untuk mengakses CSR/PKBL. Langkah-langkah pengembangan kemitraan:
 - 1) Identifikasi pelaku dan permasalahannya;
 - 2) Fasilitasi kemitraan usaha; dan
 - 3) Pendampingan dan monitoring.
 - b. Fasilitasi akses pembiayaan. Kendala utama pembiayaan usaha kelautan dan perikanan diantaranya yaitu: (1) adanya gap informasi pembiayaan, akibat kurangnya informasi akses pembiayaan di sisi pelaku usaha, dan minimnya informasi calon debitur potensial di sisi lembaga pembiayaan; dan (2) Rendahnya literasi keuangan, dimana sebagian besar pelaku usaha kelautan perikanan memiliki literasi keuangan yang rendah. Langkah operasional fasilitasi akses pembiayaan meliputi:
 - 1) penjaringan calon debitur potensial,
 - 2) peningkatan kelayakan usaha,
 - 3) sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan,
 - 4) pendampingan manajemen usaha,
 - 5) peningkatan literasi keuangan, dan
 - 6) pengembangan skema pembiayaan digital (*fintech*).
 - c. Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA). Strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah:
 - 1) Rapat kerja teknis tenaga pendamping usaha; dan
 - 2) Pembinaan tenaga pendamping usaha .
 - c. Pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan. Strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah:
 - 1) Penumbuhan wirausaha baru dan pendampingan wirausaha;
 - 2) Pembentukan dan penguatan inkubator bisnis; dan
 - 3) Penguatan kelembagaan kelompok menjadi koperasi.
 - d. Fasilitasi digitilisasi usaha. Secara prinsip, digitalisasi usaha adalah mengubah pola komunikasi, interaksi, dan fungsi-fungsi yang ada dalam

usaha menjadi digital. Hal ini bersinergi dengan perizinan online karena menumbuhkan bakat dan minat pelaku usaha untuk berinteraksi secara online. Digitalisasi ini mendukung misi Presiden terkait struktur ekonomi produktif dan berdaya saing menyongsong Revolusi Industri 4.0. Manfaat digitalisasi usaha adalah kerja lebih cepat, efektif, tenaga kerja sedikit, dan jangkauan pelanggan lebih luas.

Langkah-langkah untuk mendorong digitalisasi usaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah:

- 1) pembinaan pemanfaatan teknologi digitalnya;
- 2) membangkitkan ketertarikan bermedia sosial yang sehat;
- 3) bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi bisnis yang ada;
- 4) fasilitasi penyiapan desain website yang menarik (*mobile friendly*);
- 5) inovasi produk selalu diperhatikan;
- 6) pembinaan cara berinteraksi dan memberi pelayanan di media sosial;
- 7) responsif terhadap keluhan pelanggan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2024. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Perjanjian Kinerja pada Triwulan I mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebijakan terbaru tentang penetapan indikator kinerja pada setiap level. Perjanjian Kinerja yang telah disahkan sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Usaha dan Investasi

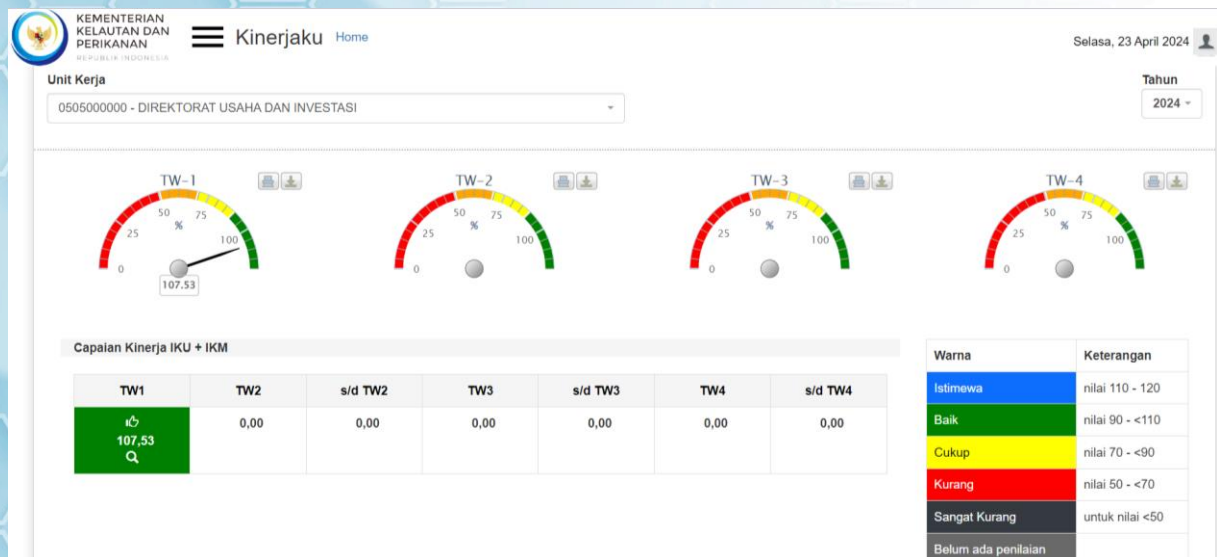
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan	1.	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5
		2.	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8
2.	Tersedianya dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i>	3.	Dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i> (Dokumen)	4
3.	Terlaksananya promosi usaha dan investasi	4.	Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	4
4.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan	5.	Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	45

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
5.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha	6.	Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)	875
		7.	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha (UMKM)	2.565
		8.	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha (UMKM)	125
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	9.	Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (Orang)	10.770
7.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi	10.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	75
		11.	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	87
		12.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	84
		13.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	100
		14.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	80
		15.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)	1
		16.	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	94
		17.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	93,75

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja seluruh level lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2024 pada SAPK dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 1 Dashboard Nilai NPSS Direktorat Usaha dan Investasi

NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. NPSS Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2024 sebesar 107,53%.

Direktorat Usaha dan Investasi pada Tahun 2024 menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) dengan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis.

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan I Tahun 2024, terdiri atas 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2024

No	Indikator Kinerja (IK)	Target		Realisasi			
		2024	TW I	TW I	Sd TW I	% thd Target TW I	% sd thd Target 2024
1	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5	-	-	-	-	-
2	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8	-	-	-	-	-
3	Peluang investasi yang ready to offer (Dokumen)	4	-	-	-	-	-
4	Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	4	1	1	1	100	25
5	Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	45	4	4	4	100	8,88
6	Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina	875	150	150	150	100	17,14
7	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi Pemberdayaan Usaha	2565	150	150	150	100	5,85
8	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir	125	26	26	26	100	20,80
9	Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan	10770	940	1106	1106	117,7	10,27
10	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	75	-	-	-	-	-

11	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	87	-	-	-	-	-
12	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	84	-	-	-	-	-
13	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	100	-	-	-	-	-
14	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	80	-	-	-	-	-
15	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)	1	-	-	-	-	-
16	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	-	-	-	-	-
17	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	93,75	-	-	-	-	-
18	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	80	-	-	-	-	-
19	Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	80	-	-	-	-	-

3.2.1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan

IK1. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) selalu berupaya untuk mendorong peningkatan realisasi investasi melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi udang, dan Penangkapan Ikan Terukur. Selain itu untuk mendukung program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Nilai persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi termasuk dalam *outcome* yang harus dicapai Direktorat Usaha dan Investasi sebesar 5%. Nilai tersebut diperoleh dari persentase selisih pelaku usaha yang melakukan investasi pada tahun sebelumnya dengan tahun ini. Capaian tersebut baru dapat dihitung pada Triwulan IV, hal ini dikarenakan penilaian terhadap persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi baru dilakukan pada akhir tahun.

Untuk memenuhi capaian tersebut pada triwulan I 2024 telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka percepatan peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi. Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja lingkup Usaha Direktorat Usaha dan Investasi untuk menghitung capaian indikator jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada periode berjalan.

Tabel 3. 2 Khtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	-	5	-	5	-	24,45	-	-	-	-	-	-



Gambar 3. 2 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi

IK2. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program

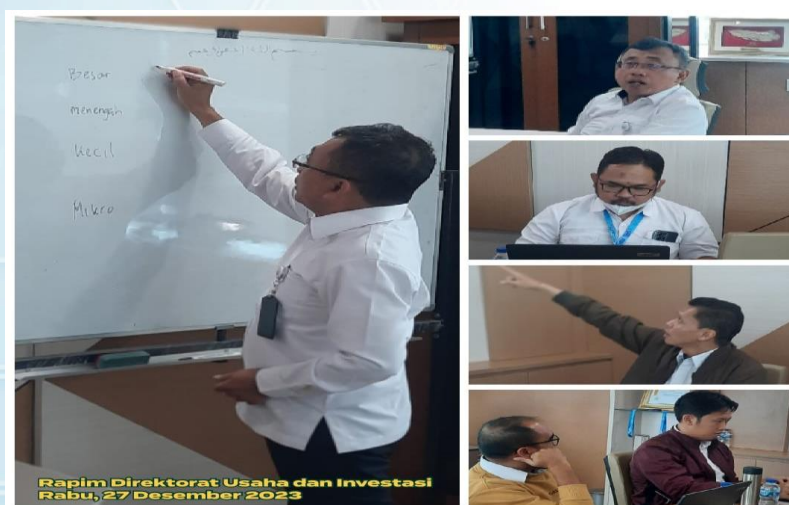
Indikator kinerja ini menunjukkan persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan kredit program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi), dan skema pembiayaan kredit program lainnya, yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank kepada UMKM hasil kelautan dan perikanan.

Peningkatan pelaku Usaha KP yang mendapatkan kredit program periode tahun 2024 adalah akumulasi pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan kredit program periode bulan Januari-Desember 2024. Adapun metode penghitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menghitung realisasi pertumbuhan debitur kredit program pada

periode tahun berjalan dengan periode tahun sebelumnya (*year on year*). Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 8%. Untuk memenuhi capaian tersebut pada triwulan I 2024 telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang mendapatkan/merealisasikan pembiayaan kredit program di sektor kelautan dan perikanan. Rapat pimpinan perhitungan persentase tersebut dipimpin oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi untuk membahas capaian indikator kinerja jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program pada periode berjalan.

Tabel 3. 3 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	-	8	-	8	-	9,37	-	-	-	-	-	-



Gambar 3. 3 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program

3.2.2. Sasaran Strategis 2

Tersedianya Peluang Investasi Yang *Ready to Offer*

IK3. Peluang investasi Yang *Ready to Offer*

Dokumen peluang investasi yang *ready to offer* merupakan dokumen yang mengangkat potensi daerah dan peluang investasinya berdasarkan komoditas unggulan dan/atau kawasan/lokasi prioritas, dimana dokumen tersebut sudah siap ditawarkan kepada calon investor (*ready to offer*) karena telah dianalisa tingkat kelayakan investasinya, minimal ditinjau dari aspek (i) legalitas; (ii) finansial; (iii) teknis produksi dan operasional; (iv) sosial ekonomi. Kegiatan ini dilakukan melalui tahapan (i) identifikasi lokasi/kawasan potensial; (ii) Koordinasi dan pembahasan konsep kajian; (iii) penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* oleh Tim Konsultan; (iv) FGD pengayaan data dan informasi di daerah, dan (v) pendampingan.

Tabel 3. 4 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Peluang investasi Yang *Ready to Offer* Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Peluang investasi yang <i>ready to offer</i>	-	3	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2024 ditargetkan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* sebanyak 4 dokumen, pada triwulan I tidak ada target dan realisasi capaian IKU dokumen peluang investasi yang *ready to offer*, hal ini dikarenakan pada triwulan I kegiatan baru di khususnya untuk identifikasi dan pemetaan peluang investasi sebelum disusun dokumen investasi *ready to offer*.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP antara lain:

1. Identifikasi dan koordinasi lokus pemetaan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua
 - Kegiatan dilakukan pada tanggal 24-26 Januari 2024 di Kabupaten Biak Numfor yang menjadi lokasi *pilot project* untuk dua proyek strategis KKP, yaitu : sebagai

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sejak tahun 2016, serta sebagai Kampung Nelayan Modern (Kalamo) tahun 2023. SKPT Biak Numfor yang terpusat di PPI Fandoi telah beroperasi sejak tahun 2019 dan telah mampu menarik kapal penangkap ikan skala menengah dan besar (di atas 30 GT), serta mampu menghadirkan investor untuk membangun usaha pembekuan dan pengolahan ikan;

- Pemkab Biak Numfor mengusulkan tiga lokasi untuk ditawarkan kepada calon investor, yaitu : dua lokasi di Kawasan Pelabuhan yang dikelola Pelindo dengan luas masing-masing 5.000 m² dan 7.000 m² (dokumentasi lokasi terlampir), serta satu lokasi milik Pemkab Biak Numfor yang berjarak kurang dari 5 km dari pusat pemerintahan (luas dan status lokasi harus dikonfirmasi ulang). Adapun jenis usaha yang akan dianalisa kelayakan investasinya yaitu : kapal penangkapan ikan tuna 60 GT atau lebih yang terintegrasi dengan usaha pembekuan dan pengolahan ikan tuna dari tuna grade A hingga grade C;
- Rencana Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan Biak Numfor (a) Biak Numfor diharapkan dapat menjadi pusat usaha penangkapan ikan tuna dari Samudera Pasifik dan ditargetkan mampu memenuhi 30% kebutuhan bahan baku tuna dari UPI nasional; (b) Pengembangan usaha tuna diarahkan dapat dilakukan secara terintegrasi hulu hilir, yang meliputi usaha penangkapan, transportasi, pembekuan, dan pengolahan tuna (tuna sashimi dan tuna kaleng); (c) KKP bersama Pemkab Biak Numfor akan mendorong terwujudnya rencana ekspor langsung produk perikanan dari Biak ke Narita-Jepang; (d) Pemkab Biak Numfor mengusulkan pembangunan *cold storage* kapasitas 2000 ton untuk mengantisipasi kerusakan ikan akibat antrian bongkar muat yang terlalu panjang dan lama, serta sebagai pusat konsolidasi muatan ikan dari Biak Numfor dan kabupaten sekitar; (e) Rencana investasi akan dilakukan oleh Pindad tetapi masih dalam proses mempelajari pola bisnis perikanan eksisting; (f) Investasi *cold storage* juga ditargetkan untuk pemilik 22 unit kapal kapasitas besar yang berlabuh di Biak
- Dokumentasi



Gambar 3. 4 Lokasi yang siap ditawarkan ke investor dengan luas 5.000 m²



Gambar 3. 5 Lokasi yang siap ditawarkan ke investor dengan luas 7.000 m²

2. Koordinasi dan Persiapan Penyusunan Dokumen Peluang Investasi yang *Ready to Offer* Komoditas Tuna di Kabupaten Biak Numfor

- Kegiatan dilakukan pada tanggal 21 Februari 2024 di Ruang Rapat Branding secara hybrid yang dipimpin oleh Katimja Investasi, yang diikuti oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor; perwakilan dari Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP, dan pegawai lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, serta tim peneliti PT. Indekstat Konsultan Indonesia selaku calon konsultan;
- Tujuan kegiatan ini untuk membahas penetapan lokasi target dan jenis peluang investasi, aspek kelayakan investasi dan kebutuhan data dukung, serta penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- Hasil diskusi dan pembahasan antara lain (a) Lokasi di Pelindo yang seluas 7700 m² akan dipakai oleh Pindad, yang akan digunakan untuk membangun UPI untuk penanganan hasil tangkapan sebelum dimasukkan dalam referer container; (b) Lokasi di Pelindo yang siap digunakan seluas 5000 m² dan lahan Pemkab Biak Numfor seluas 3000 m² diarahkan untuk lokasi pembangunan CS 2000 ton; (c)

Alternatif lokasi milik eks PT. Biak Mina Jaya karena sangat memungkinkan dimanfaatkan melihat sudah ada UPI di situ; (d) Progress pembangunan UPI milik Samudera Ulam Nusantara sudah 90% dan siap beroperasi di bulan April. Pembangunan masih terkendala masalah IMB karena lokasi milik AL. Produk : tuna loin. Tujuan pengiriman ke Bitung dan ekspor dari Bitung; (e) Perlu dijajaki kemitraan antara UPI di Biak dengan buyer potensial di Jepang; (f) Kondisi saat ini ikan Biak dikirim ke Ambon dan Bitung untuk diolah dan diekspor ke AS;

- Saran dan tindak lanjut yaitu (a) *Benchmarking* pengolahan tuna lebih baik ke Bitung karena lebih pengalaman; (b) Perlu segera disusun dokumen pengadaan untuk jasa lainnya Penyusunan Peluang Investasi Komoditas Tuna di Kab. Biak Numfor; (c) Direktorat Usaha dan Investasi akan segera koordinasi dengan DKP Sulut dan PPS Bitung terkait UPI yang direkomendasikan untuk *benchmarking*; (d) Perlu segera disusun jadwal pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peluang Investasi Komoditas Tuna di Kab. Biak Numfor, sehingga diharapkan hasil kegiatan ini dapat disampaikan pada saat puncak kegiatan Tahun Tuna 2024.
- Dokumentasi



Gambar 3. 6 Koordinasi dan Persiapan Penyusunan Dokumen Peluang Investasi yang Ready to Offer Komoditas Tuna di Kabupaten Biak Numfor

3. Koordinasi dan Persiapan Penyusunan Dokumen Peluang Investasi melalui Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi di Lokasi Prioritas

- Koordinasi Direktorat Usaha dan Investasi dilaksanakan pada hari Jumat 23 Februari 2024 secara *hybrid* di Ruang Rapat Direktorat Usaha dan Investasi serta melalui aplikasi zoom meeting bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Dinas Perikanan Kota Tual, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual, Pelabuhan

Perikanan Pantai (PPP) Dobo, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao, Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, serta tim peneliti PT. Indekstat Konsultan Indonesia selaku calon konsultan, bertujuan untuk membahas penyampaian konsep informasi peluang investasi sektor kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan, penjelasan tahapan identifikasi peluang investasi pada wilayah masing-masing; dan penjelasan pengisian kuesioner pendataan;

- Direktorat Usaha dan Investasi akan menyusun Peluang Investasi yang *Ready to Offer* pada beberapa lokasi strategis sebagai target kegiatan prioritas KKP yaitu Penangkapan Ikan Terukur, Kampung Nelayan Modern/Maju, serta Modeling Pengembangan Usaha Rumput Laut. Beberapa lokasi yang diusulkan yaitu : PPS Lampulo, PPN Tual, PPP Dobo, Kabupaten Rote Ndao, serta Kabupaten Maluku Tenggara. Adapun syarat utama lokasi target tersebut yaitu (a) Luas lokasi minimal 2000 m² untuk peluang investasi usaha pengolahan dan minimal 1 Ha untuk peluang investasi usaha budidaya; (b) Alamat lokasi jelas, berikut dengan titik koordinatnya; (c) Status kepemilikan lahan jelas dan bebas sengketa; (d) RTRW lahan untuk usaha perikanan dan/atau industri; (e) Memiliki akses jalan, jaringan listrik, dan air bersih; (f) Diutamakan dalam suatu kawasan ekonomi, seperti : KEK, Kawasan Industri, dan Pelabuhan Perikanan.
- Karena keterbatasan SDM, waktu, dan biaya, maka akan dipilih 2 lokasi target penyusunan peluang investasi berdasarkan analisa awal dari kuisisioner yang akan disampaikan (link kuisisioner <https://forms.gle/buDYD1eknZ7rPbaP6>). Metode yang digunakan untuk menganalisa potensi dan peluang investasi pada daerah-daerah tersebut adalah metode pembobotan untuk mengukur status kelayakan lokasi target investasi berdasarkan 4 aspek utama, yaitu : Aspek Hukum dan Legalitas; Aspek Teknis Produksi; Aspek Teknis Operasional; serta Aspek Sosial dan Lingkungan;

Saran dan tindak lanjut (a) Perwakilan pelabuhan perikanan dan DKP peserta kegiatan akan segera mengisi kuisisioner melalui link yang telah dibagikan; dan (b) Direktorat Usaha dan Investasi akan segera melakukan analisa awal dan menentukan daerah mana yang paling siap untuk ditawarkan kepada calon investor.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp92.322.070,- atau setara dengan 8,19% dari total pagu

sebesar Rp1.126.953.000,- Dalam hal ini persentase penggunaan anggaran lebih besar daripada persentase realisasi capaian sebesar 17,14%, hal ini dikarenakan pada triwulan I kegiatan lebih difokuskan pada kegiatan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan kegiatan identifikasi.

3.2.3 Sasaran Strategis 3

Terlaksananya promosi usaha dan investasi

IK4. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan

Kegiatan promosi usaha dan investasi bertujuan untuk menarik minat investasi di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan perluasan usaha. Tahapan kegiatan meliputi (i) pemetaan data potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan; (ii) promosi peluang investasi usaha kelautan dan perikanan; dan (iii) pendampingan investasi. Kegiatan Fasilitasi Promosi Peluang Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk: (i) Mempromosikan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan kepada pelaku usaha/calon investor; (ii) Fasilitasi *Investment matching* antara *G to B* yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dengan calon investor dan *B to B* antara perusahaan dengan calon investor.

Tabel 3. 5 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP Triwulan I 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Promosi Usaha dan Investasi KP (Kegiatan)	1	3	-	4	1	3	1	1	100	100	-	25

Pencapaian kegiatan promosi usaha dan investasi KP pada triwulan 1-2024 sebanyak 1 kegiatan dengan persentase 25% dari target tahun 2024. Kegiatan promosi investasi usaha kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan pada triwulan 1-2024 sebagai berikut:

- Indonesia Marine and Fisheries Business and Investment Forum (IMFBF) 2024
 - Penyelenggaraan IMFBF 2024 merupakan kerja sama KKP dengan CNBC Indonesia, yang dilaksanakan di Hotel Fairmont Jakarta tanggal 5 Februari 2024, dan disiarkan secara eksklusif dan live di Youtube channel KKP, CNBC Indonesia

TV, dan streaming di cnbcindonesia.com. Tema yang diangkat adalah "Food Security, Marine and Fisheries Sustainability: Promote "Segara" to The World".

- Kegiatan dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus sebagai keynote speaker, dan dihadiri sekitar 400 tamu undangan terdiri dari 10 Duta Besar (Spanyol, Filipina, Saudi Arabia, Mozambique, Turki, Hungaria, Yunani, British, Moroko, dan Mesir), perwakilan 15 Kedutaan Besar (Australia, Swiss, Timor Leste, Laos, China, Filipina, British, Kuwait, Thailand, Norwegia, Hungaria, Jepang, Afrika Selatan dan Kamboja), K/L, Asosiasi, Perusahaan, NGO, Dinas KP, dan Pejabat Eselon II lingkup KKP.
- Berdasarkan hasil penjangkaran minat investasi, terdapat 17 responden yang berminat untuk melakukan investasi di sektor kelautan dan perikanan, dengan rencana investasi mencapai Rp 90 milyar terdiri dari PMDN (81,8%) dan PMA (18,2%), dengan bidang usaha yang diminati adalah pengolahan (36,4%), budidaya (27,3%), pemasaran (27,3%) dan penangkapan (9,1%).
- Dokumentasi



Gambar 3. 7 Indonesia Marine and Fisheries Business and Investment Forum (IMFBF) 2024

2. Pendampingan rencana investasi komoditas rumput laut dengan PT Indorama

- Pendampingan dilaksanakan pada hari Senin, 4 Maret 2024 dipimpin oleh Direktur Usaha dan Investasi. PT. Indorama memiliki rencana untuk mengembangkan usaha rumput laut terintegrasi dari hulu ke hilir. Jenis rumput laut yang akan dikembangkan yaitu *Ulva* sp. dan *E. cottonii*. Pola budidaya rumput laut akan dilakukan di darat sehingga membutuhkan lahan yang sangat luas dan dekat dengan laut. Adapun target produk usaha pengolahannya, yaitu : *karaginan, bio stimulant, dan bio degradable plastic*;

- PT. Indorama berharap ada rekomendasi minimal dua lokasi investasi alternatif selain di Kab. Wakatobi. Syarat utama lokasi dimaksud yaitu : dekat dengan laut/pantai, luas lahan 50 - 100 Ha, logistik tersedia, suplai air bersih dan listrik memadai, serta adanya akses ke pelabuhan umum dan bandara. Usulan lokasi tersebut diharapkan juga dapat dilengkapi dengan data dukung berupa : produksi rumput laut eksisting, ketersediaan infrastruktur dasar dan khusus, serta profil umum sektor kelautan dan perikanan lokal;
- PT. Indorama memiliki komitmen untuk bermitra dengan pengusaha/ pembudidaya rumput laut lokal, dengan syarat bahwa pembudidaya tersebut bersedia dibina agar kualitas rumput lautnya memenuhi standar pabrik;
- Untuk memperkuat analisa rencana investasi pabrik rumput laut dengan produk refined carrageenan (RC), PT. Indorama juga berharap KKP dapat merekomendasi konsultan atau ahli dalam bidang pengolahan RC, baik terkait mesin, kualitas bahan baku dan produk, hingga pemasarannya.
- Saran dan tindak lanjut (a) Direktorat Usaha dan Investasi akan segera melakukan pemetaan lokasi seperti permintaan PT. Indorama; (b) Direktorat Usaha dan Investasi akan menyampaikan rekomendasi konsultan pengolahan rumput laut dengan produk RC;
- Dokumentasi



Gambar 3. 8 Pendampingan rencana investasi komoditas rumput laut dengan PT Indorama

3. Pendampingan rencana investasi PT Krueng Triton Indonesia

- Pendampingan dilaksanakan tanggal 15 Februari 2024 dihadiri oleh Direktur Usaha dan Investasi, Bapak Kukuh Siswoyo (Founder PT Krueng Triton Indonesia), serta perwakilan Timja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi
- Jenis usaha yang akan dilakukan oleh PT. Krueng Triton yaitu Docking Kapal, Pengalengan Ikan Tuna, dan Pengolahan Udang. Nilai investasi yang diajukan untuk membangun usaha tersebut yaitu sekitar Rp800 Miliar. Nilai investasi tersebut tergolong cukup besar karena bisnis prosesnya dimulai dari hulu (pengadaan kapal tuna dan revitalisasi tambak udang) hingga hilir (pemasaran dengan tujuan ekspor).
- Calon Lokasi untuk Unit Pengalengan Tuna, Docking kapal dan Pengolahan Udang rencana akan berada pada kawasan PPS Lampulo dengan skema HGU (milik Pemda) namun setelah kondisi politik di Aceh sudah membaik akan dialihkan ke Ladang (sewa Lahan) karena lokasi dekat dengan Pelabuhan Malahayati, Aceh Besar (Pelabuhan Ekspor).
- Analisa usaha docking kapal termasuk dalam proposal pengalengan tuna untuk memfasilitasi perbaikan kapal nelayan yang nantinya akan dibuat suatu skema kerjasama dengan nelayan local. Kondisi saat ini, untuk perbaikan kapal masih dilakukan secara tradisional dengan ditarik ke pantai) sehingga membutuhkan waktu perbaikan kapal yang lama.
- PT. Krueng Triton sudah memiliki izin lingkungan untuk melengkapi persyaratan untuk menerbitkan Sertifikat Standart (SS). PT Krueng Triton akan melakukan survei ke Gresik dan Banda Aceh untuk koordinasi terkait dengan validasi proposal bisnis dan selanjutnya akan dilakukan perjanjian dengan pihak pendanaan
- Saran dan tindak lanjut dari pendampingan investasi PT Krueng Triton Indonesia, antara lain : (a) Pastikan lokasi lahan *clear and clean*; (b) Lakukan kembali studi kelayakan usaha oleh professional; (c) Melakukan *update* penyusunan proposal sebelumnya; (d) Mengajukan perizinan berusaha, perizinan pengolahan, dan seterusnya; (e) Untuk rencana usaha docking kapal dapat berkoordinasi dengan DJPT terkait prosedur pengembangan usaha docking kapal;
- Dokumentasi



Gambar 3. 9 Pendampingan rencana investasi PT Krueng Triton Indonesia

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp544.772.078,- atau setara dengan 24,14% dari total pagu sebesar Rp2.256.532.000,- Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 25,00%, lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 24,14%.

3.2.4 Sasaran Strategis 4

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan

IK5. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)

Dalam rangka memperkuat sinergi untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan Indonesia melalui pengembangan peran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, maka pada tanggal 30 Agustus 2021 telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 10/MEN-KP/KB/VIII/2021 dan 17/KB/M.KUKM/VIII/2021 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi di Sektor Kelautan dan Perikanan.

Ditjen PDSPKP menindaklanjutinya dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM tentang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bagi koperasi dan UMKM yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2021. Salah satu wujud sinergi program yang dilaksanakan yakni mendorong UMKM bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk dapat naik

kelas melalui peningkatan kapasitas kelembagaan usaha, dari semula berbentuk kelompok usaha pengolah dan pemasar (Poklahsar) menjadi lembaga berbadan hukum koperasi. Diharapkan dengan terbentuknya koperasi maka poklahsar dapat mencapai skala ekonomi yang lebih menguntungkan, memiliki kekuatan hukum sehingga dapat mengakses pembiayaan serta meningkatkan posisi tawar dalam bermitra dengan pelaku usaha lain.

Pada Indikator kinerja ini yang dimaksud Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya adalah Lembaga usaha yang difasilitasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan. Pada tahun 2024 kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan dilakukan kepada lembaga usaha dengan kategori: 1) lembaga usaha non formal (kelompok pengolah dan pemasar) menjadi lembaga usaha formal/berbadan hukum, 2) lembaga usaha berbadan hukum namun perlu dilakukan penguatan kembali karena mendukung program tertentu seperti korporasi nelayan, klaster daya saing, kampung nelayan maju, kampung budidaya, Inkubator Mina Bisnis dan program lainnya.

Tabel 3. 6 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga Usaha yang Ditingkatkan Kapasitasnya Triwulan I 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Lembaga Usaha Hasil KP yang Ditingkatkan kapasitasnya)	4	6	4	45	4	6	4	4	100	100	100	8,88

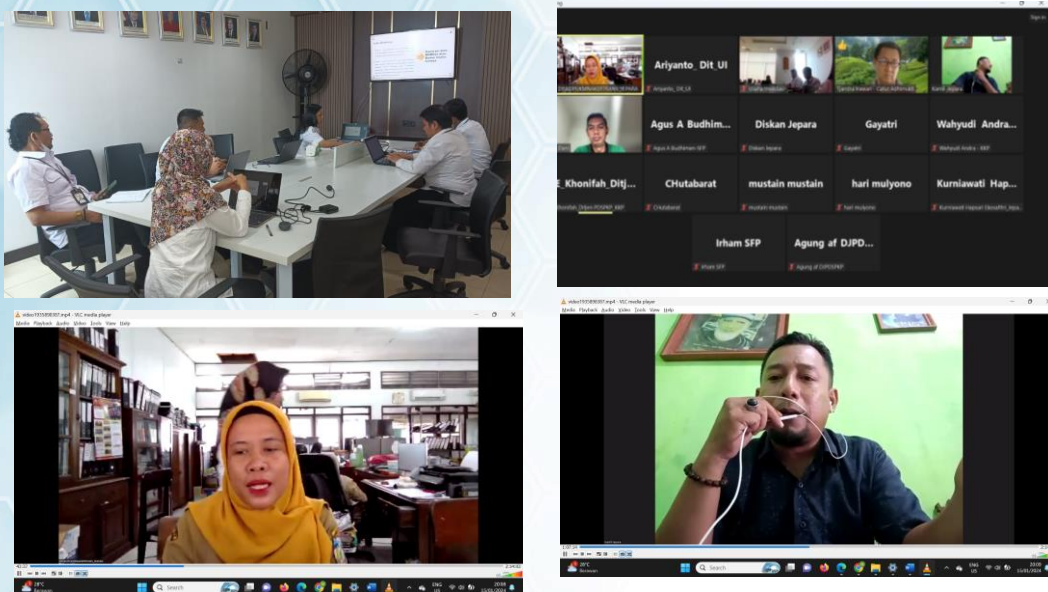
Target Lembaga usaha yang ditingkatkan dan dibina kapasitas kelembagaannya pada tahun 2024 sebanyak 45 lembaga, sedangkan target pada triwulan I tahun 2024 adalah sebanyak 4 lembaga. Realisasi capaian jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah ditingkatkan dan dibina kapasitasnya pada triwulan I tahun 2024 adalah 4 lembaga usaha, hal ini sesuai target dan telah mencapai 100%, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 maka realisasi lembaga usaha hasil KP yang telah ditingkatkan sebesar 8,88%, capaian ini sama apabila dibandingkan dengan

capaian periode yang sama pada tahun 2023 tercapai 100%. Adapun lembaga usaha yang telah ditingkatkan kapasitasnya pada triwulan I Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah dilakukan pada triwulan I, antara lain:

a) Rapat Inisiasi Pembentukan Badan Usaha (Forkom Jepara) tanggal 15 Januari 2024 di Kabupaten Jepara

Forum Komunikasi Nelayan Rajungan Nusantara terdiri dari 359 anggota dan sudah memiliki NIB dan Kusuka dengan bidang usaha penangkapan rajungan, penyediaan umpan dan bubu, serta anggota telah tersebar di 20 kabupaten. Forkom berniat untuk mengembangkan bidang usaha menjadi menjadi pengepul, yaitu mengambil rajungan dari anggota kemudian dipasarkan yang kemudian akan dikembangkan menjadi miniplant rajungan rebus kupas sehingga membutuhkan akses untuk dapat menjalin kerja sama dengan UPI rajungan. Terkait dengan hal ini, SFP sebagai pendamping Forkom sudah melakukan usulan pembentukan badan usaha ke Ditjen PDSPKP.



Gambar 3. 10 Rapat Inisiasi Pembentukan Badan Usaha Kabupaten Jepara

b) Rapat Koordinasi Permohonan Data dan Kelompok tanggal 16 Januari 2024.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha KP untuk memperoleh data kelompok maupun poklhasar dari unit eselon 2 lingkup Ditjen PDSPKP (data poklhasar yang telah dibina dan menerima Bantuan Pemerintah), perwakilan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan BPPSMKP, dan para stakeholder bidang kelautan perikanan.



Gambar 3. 11 Rapat Koordinasi Permohonan Data dan Kelompok

c) Peningkatan Kelembagaan usaha hasil KP di Kabupaten Jepara dan Demak pada tanggal 16-19 Januari 2024

Peningkatan kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan di Kabupaten Jepara merupakan tindak lanjut dari rapat Inisiasi pembentukan lembaga usaha tanggal 15 Januari 2024 untuk melihat secara langsung kesiapan Forum Komunikasi Rajungan Nusantara dalam membentuk lembaga usaha.

Selain itu juga dilakukan kunjungan ke beberapa pelaku usaha KP dan koperasi perikanan yang sudah terbentuk di Kabupaten Demak dalam rangka pendampingan yaitu: Poklahsar Ayu Lestari, Koperasi Asap Indah Wonosari, Koperasi Pijar Mas, dan Koperasi Sri Say Adem,



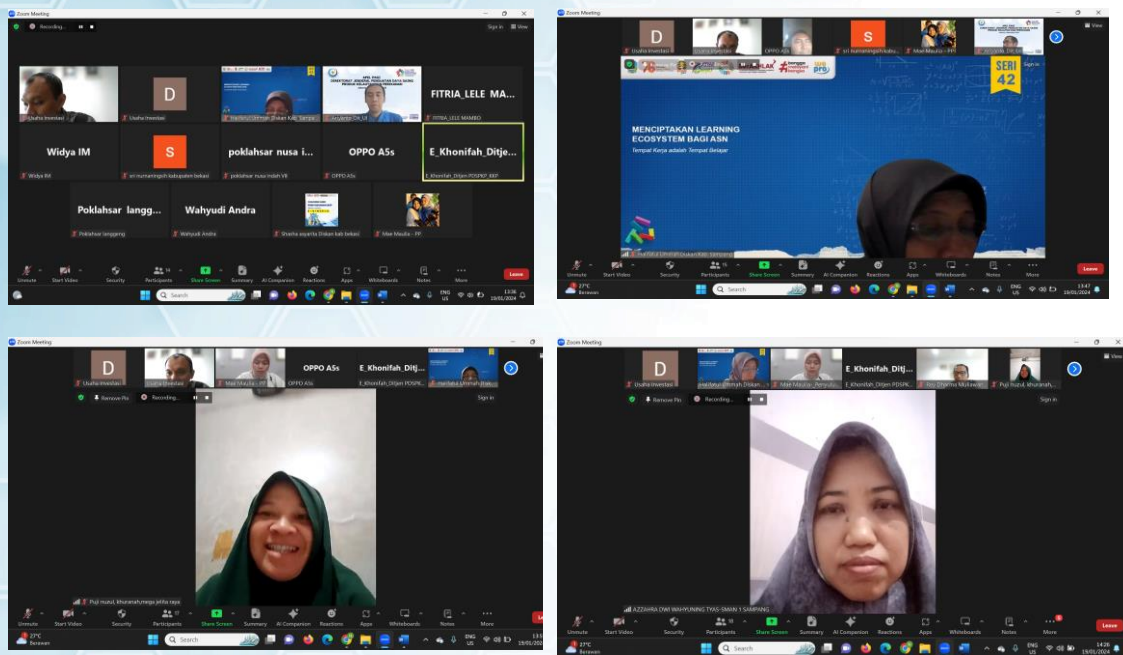
Gambar 3. 12 Pendampingan Penguatan Kelembagaan usaha hasil KP di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak

d) Rapat Inisiasi Pembentukan Badan Usaha Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Sampang tanggal 19 Januari 2024

Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi mengusulkan 2 poklahar untuk ditingkatkan kelembagaan usahanya menjadi koperasi yaitu Kelompok Nusa Indah 7 dan Kelompok Mega Jelita Raya. Dinas Perikanan dan Dinas Koperasi Kabupaten Bekasi bersedia memberikan pendampingan dalam proses pembentukan koperasi.

kedua calon koperasi ini ingin membentuk koperasi pemasaran.

Dinas Kabupaten Sampang melaporkan bahwa sebelumnya pernah mengusulkan 3 kelompok membentuk koperasi dan sudah dibentuk 1 koperasi pada tahun 2023. Sedangkan 2 koperasi lainnya belum lama terbentuk (belum 1 tahun) dan ke depannya memohon bantuan untuk pembinaan koperasi.



Gambar 3. 13 Rapat Inisiasi Pembentukan Lembaga Usaha hasil KP di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Sampang

e) Rapat Inisiasi Pembentukan Badan Usaha Kabupaten Indramayu tanggal 23 Januari 2024

Hasil dari kegiatan adalah terdapat 2 poklhasr dari Kabupaten Indramayu yang akan ditingkatkan kelembagaan usahanya menjadi koperasi yaitu Poklhasr Mandiri Jaya dan Poklhasr Mawar. Poklhasr Mandiri Jaya memproduksi produk olahan perikanan berupa bakso, sempol, dan rengginang ikan. Poklhasr mawar memproduksi kerupuk ikan patin.



f) Rapat Pra Pembentukan Lembaga Usaha KP di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Indramayu tanggal 24-25 Januari 2024

Menindaklanjuti rapat Rapat Persiapan Inisiasi Pembentukan Badan Usaha pada tanggal 19 Januari 2024 maka perlu dikoordinasikan dengan stakeholder terkait kesiapan Poklhasr Mega Jelita Raya dan Companion Nusa Indah Sukadami membentuk badan usaha. Poklhasr Nusa Indah Sukadami anggotanya memproduksi abon ikan, stick

ikan dan kerupuk tulang ikan. Dan telah mendapatkan bantuan dari UPN berupa alat pengolah tulang ikan untuk menjadi tepung tulang ikan sebagai bahan baku pembuatan krupuk tulang ikan. Dinas Koperasi Kabupaten Bekasi akan menyediakan semua form persyaratan pembenrukan koperasi dan akan melakukan pendampingan bersama Dinas Perikanan.

Poklahsar Mandiri jaya dan Poklahsar membuat produk olahan berupa Mawar Bakso, sempol, rengginang, dan kerupuk kulit ikan patin. Dari hasil diskusi jenis koperasi yang disarankan adalah koperasi konsumen karena mempunyai cakupan usaha lebih luas (jasa, pemasaran, simpan pinjam) dan untuk mengantisipasi perkembangan usaha dimasa mendatang. 9. Tindak Lanjut dari pertemuan ini adalah: Penyuluh koperasi dan penyuluh perikanan akan mengadakan pertemuan dengan poklahsar untuk membahas persyaratan sebelum rapat pendirian koperasi dan akan melakukan pendampingan/penyuluhan sampai akte/SK koperasi terbit.

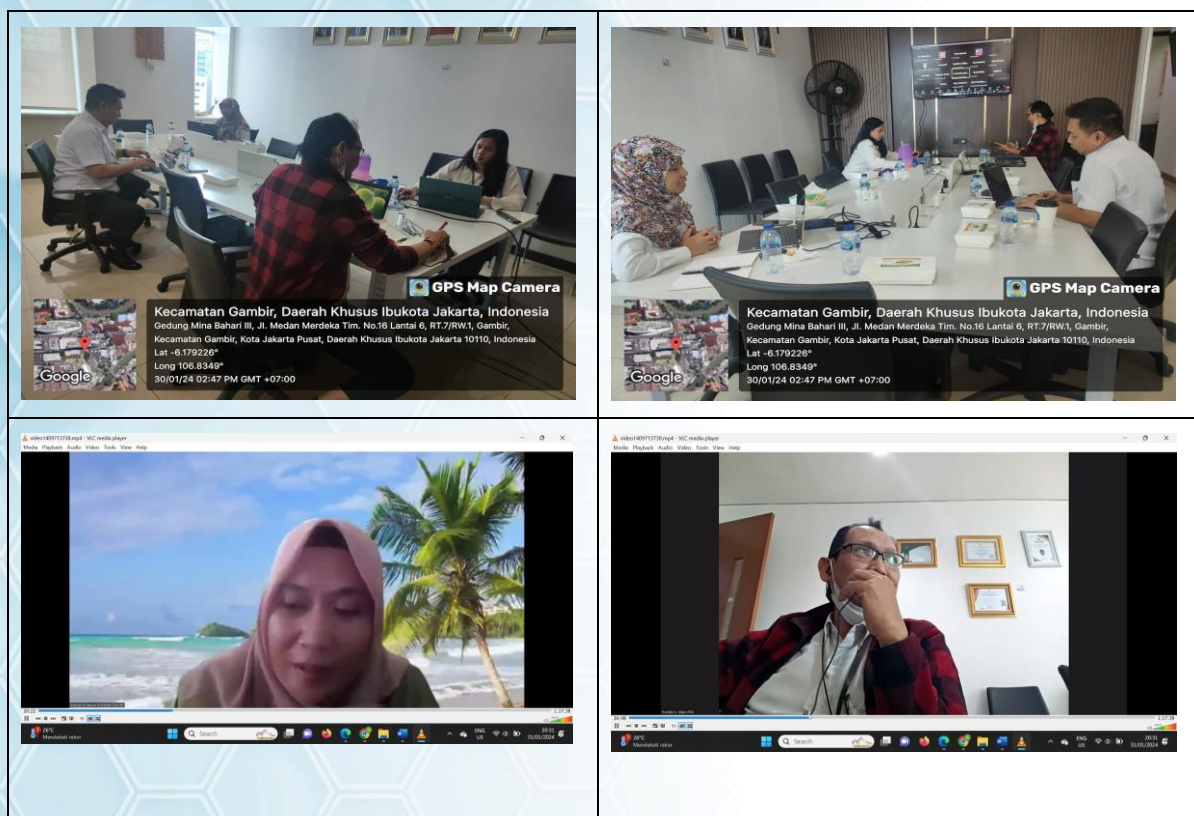


Gambar 3. 15 Rapat Pra-Pembentukan Badan Usaha di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Indramayu

g) Rapat Inisiasi Pembentukan Lembaga Usaha Kabupaten Boyolali dan Surakarta tanggal 30 Januari 2024

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali telah mengusulkan Kelompok Pengolah dan Pemasar Wanita Mina Utama (KARMINA) untuk dapat difasilitasi peningkatan kelembagaan badan usahanya. Namun masih ragu terkait manfaat dengan terbentuknya koperasi. Sebelumnya, di Kabupaten Boyolali telah terbentuk koperasi namun bidang usahanya adalah kenelayanan. Dan akan ditawarkan oleh penyuluh perikanan apakah berminat untuk menambah bidang usaha di pengolahan dan pemasaran yang difasilitasi oleh Ditjen PDSPKP.

Untuk kelompok pengolah dan pemasar Amanah Srikandi (Asri) Kota Surakarta sudah diusulkan sejak 2022 dan sudah terbentuk pra koperasi, Sudah memiliki AD ART, simpanan wajib, pokok dan sukarela. Namun belum ditindaklanjuti dan berharap masih dapat difasilitasi untuk menjadi koperasi. Poklhasr Amanah Srikandi (Asri) aktif menjalankan usaha bahkan kekurangan tenaga kerja karena meningkatkannya permintaan.

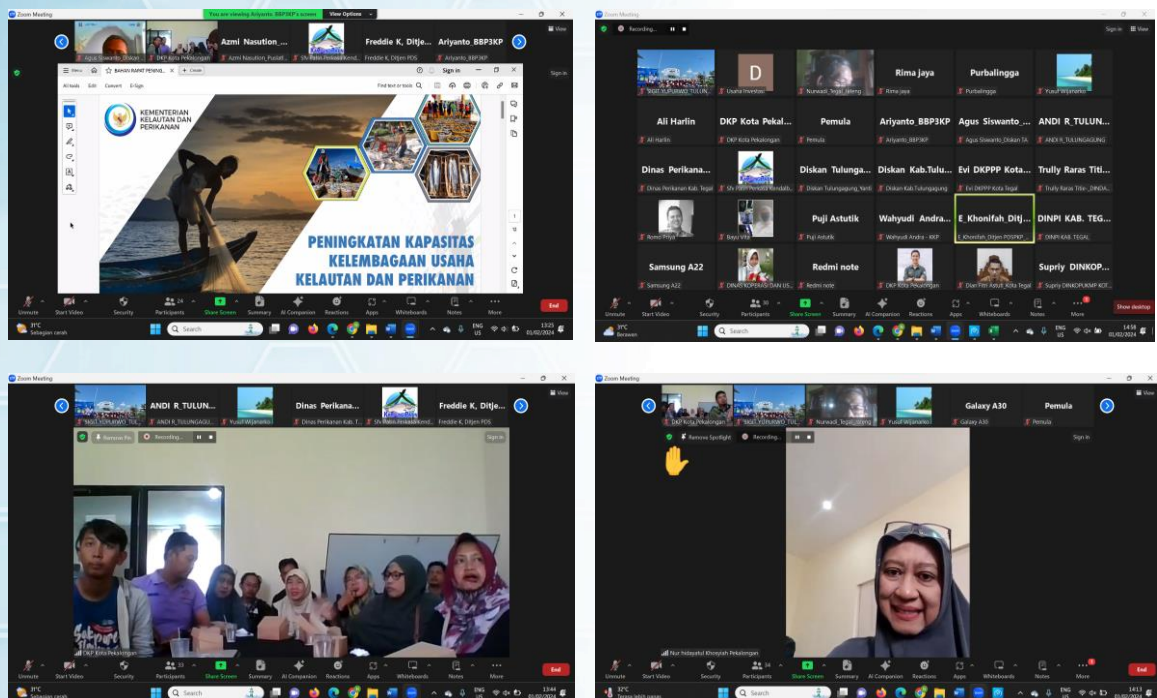


Gambar 3. 16 Rapat Inisiasi Pembentukan Badan Usaha Kabupaten Boyolali dan Surakarta

h) Rapat Inisiasi Pembentukan Lembaga Usaha Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Tulungagung tanggal 1 Februari 2024.

Dari Kabupaten Tegal sudah siap Gapokan yang terdiri dari 8 kelompok, sekitar 107 orang yang berdomisili dalam satu desa yang siap untuk bergabung untuk menjadi anggota koperasi yang akan dibentuk. Usaha yang dilakukan gapokan Kabupaten Tegal berupa ikan pindang dan ikan panggang yang merupakan usaha turun temurun yang didampingi penyuluh perikanan dan DKP Kabupaten Tegal. Usaha kelompok berjalan dengan rutin dan sudah melakukan pencatan produksi dan keuangan. Rencananya membentuk Koperasi dengan nama Darma Sandi Maju Bersama.

Di Kabupaten Purbalingga sudah ada kelompok yang melakukan kegiatan pra koperasi, sudah memiliki calon pengurus dan sedang menyusun draft AD-ART. Kelompok yang sudah aktif di bidang usaha pembenihan, pembesaran, ikan hias dan pakan. Disarankan untuk menyampaikan surat usulan dari DKP Kabupaten Purbalingga ke Direktorat Usaha dan Investasi dengan bidang usaha berupa pengolahan dan pemasaran. Secara permodalan, kelompok masih butuh bantuan permodalan.



Gambar 3. 17 Rapat Inisiasi Pembentukan Lembaga Usaha Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Tulungagung

i) Rapat Pra Pembentukan Lembaga Usaha KP di Kota Surakarta dan Kabupaten Gunung Kidul tanggal 5 – 7 Februari 2024

Poklhasr Amanah Srikandi Kota Surakarta saat ini beranggotakan 10 orang dengan jenis usaha dibidang pengolahan dengan produk utama karak lele. Adapun rata - rata volume produksi sebanyak 35 kg/bulan, dengan bahan baku berasal dari Pokdakan Srikandi yang merupakan produksi dari usaha para suami dari anggota Poklhasr Amanah Srikandi. Dinas Koperasi menyarankan agar Poklhasr Amanah Srikandi membentuk koperasi konsumen dikarenakan pembentukan koperasi nantinya akan melibatkan anggota pokdakan dan poklhasr sehingga akan memiliki cakupan usaha lebih luas (produksi, pengolahan, pemasaran, simpan pinjam).

Dinas kelautan & perikanan Prov. Yogyakarta mengusulkan 2 KUB yaitu KUB Ngupoyo Mino dan KUB Mino Makmur untuk difasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi koperasi perikanan. Berdasarkan hasil diskusi dengan para pimpinan KUB Ngupoyo Mino dan KUB Mino Makmur bahwa KUB dimaksud potensial untuk ditingkatkan kelembagaan usahanya menjadi koperasi. Koperasi nantinya akan berperan sebagai offtaker dalam pembelian hasil tangkapan nelayan di PPP Gesing.



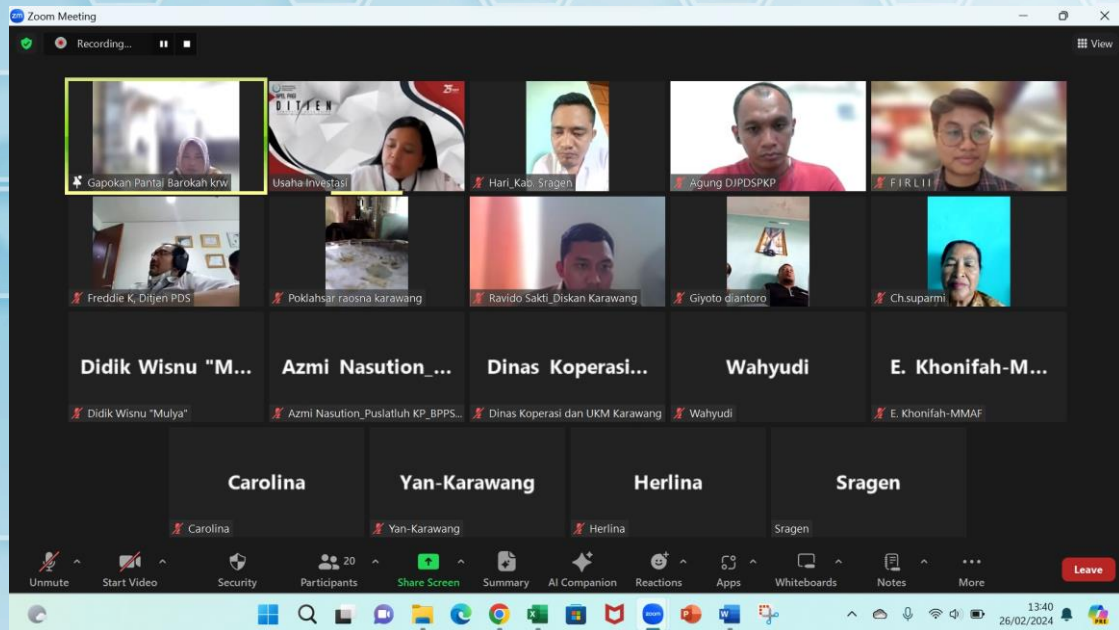
Gambar 3. 18 Rapat Pra Pembentukan Lembaga Usaha KP di Kota Surakarta dan Kabupaten Gunung Kidul

j) Rapat Inisiasi Pembentukan Lembaga Usaha Kabupaten Karawang dan Kabupaten Sragen tanggal 26 Februari 2024.

Dinas Perikanan Kabupaten Karawang mengusulkan Gapokkan Pantai Barokah dan Poklahsar Mina Peundeuy Sadulur untuk mendapatkan fasilitasi Peningkatan lembaga usaha. Gapokkan Pantai Barokah merupakan gabungan dari 3 kelompok dengan total anggotanya berjumlah 27 orang dengan produk olahannya berupa krupuk rajungan, pempek rajungan, dan kerupauk ikan remang dan sudah mempunyai rumah kemasan yang sampai saat ini hanya untuk memenuhi keperluan kelompok sendiri. Sampai saat ini gapokkan Pantai barokah belum pernah medapatkan penyuluhan terkait koperasi.

Kelompok Mulya Sragen merupakan kelompok pembudidaya ikan patin yang sudah berdiri sejak tahun 2013 dengan anggota 20 orang. Volume produksi ikan patin 22 ton/bulan/kelompok. Rencana usaha koperasi yang akan didirikan adalah bidang pemasaran dan pengolahan ikan (pengadaan benih, pakan, peralatan, dan pengolahan kulit ikan patin menjadi krupuk kulit ikan). Saat ini sudah mendapatkan penyuluhan tentang koperasi dari dinas koperasi setempat. Sudah merekrut anggota yang masih untuk mendukung manajemen koperasi seperti pembukuan, dan pemasaran online.





Gambar 3. 19 Inisiasi Pembentukan Lembaga Usaha Kabupaten Karawang dan Kabupaten Sragen

k) Penguatan Kelembagaan Usaha Hasil KP di Semarang tanggal 27 Februari 2024

Bimtek Penguatan Kelembagaan Usaha Hasil KP diikuti oleh Koperasi Asap Indah Wonosari, Koperasi Pemasaran KP Pijarmas, Koperasi Serba Usaha Puspita Bahari, dan Koperasi Produsen Sri Say Dem. Narasumber kegiatan penguatan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan berasal dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah tentang Manajemen Keuangan Koperasi dan Koperasi produsen "Citra Kina Raya" tentang success story koperasi.



Gambar 3. 20 Penguatan Kelembagaan Usaha Hasil KP di Semarang

l) Rapat Pra pembentukan lembaga usaha hasil KP dalam rangka peningkatan kelembagaan pada tanggal 25 Januari 2024 di Kabupaten Sampang

Dari hasil pertemuan yang dilakukan ditetapkan bahwa nama calon koperasi yang akan dibentuk adalah Koperasi Lele Mambo Berseri dengan jumlah anggota 15 orang. Jenis Koperasinya adalah koperasi konsumen.

m) Rapat Pra pembentukan lembaga usaha hasil KP dalam rangka peningkatan kelembagaan tanggal 4 Maret 2024 di Kabupaten Karawang

Dari hasil diskusi dengan Poklahsar Mina Peundeuy Sedulur dan Gapokkan Pantai Barokah, Dinas Koperasi Kabupaten Karawang mengusulkan bahwa jenis koperasi yang cocok dengan kondisi eksisting usaha dan rencana pengembangan usaha dari Poklahsar adalah Koperasi Produsen. Poklahsar Mina Peundeuy Sedulur dan Gapokkan Pantai Barokah bersedia dan berkomitmen untuk ditingkatkan

kelembagaan usahanya untuk menjadi koperasi serta bersedia untuk menyiapkan data dukung yang dipersyaratkan (KTP & NPWP) oleh Dinas Koperasi sebelum dilakukan Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi.



Gambar 3. 21 Rapat Pra pembentukan lembaga usaha hasil KP dalam rangka peningkatan kelembagaan di Kabupaten Karawang

n) Rapat Inisiasi Pembentukan Badan Usaha Di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Batang tanggal 20 Maret 2024

Kelompok Syisel Jaya Makmur Mojokerto beranggotakan 9 orang dan memproduksi Amplang ikan. Rencananya usaha koperasi adalah menyediakan bahan baku untuk pembuatan amplang. Omset 500 juta - 600 juta per tahun. Wilayah pemasarannya meliputi, Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. 2. Dinas Koperasi dan UKM Dinas Mojokerto, mengharapkan komunikasi terkait pembentukan koperasi agar dapat bersinergi dengan baik dan jadwal dapat di sinkronkan. Selain itu juga dijelaskan beberapa aturan tentang perkoperasian diantaranya: pengurus tidak boleh ada hubungan keluarga, kalau antar anggota boleh, dan dapat menjadikan unit simpan pinjam. Pada prinsipnya Dinas Koperasi bersedia melakukan pendampingan dan penyuluhan untuk calon koperasi Syisel Jaya Makmur dalam pembentukan koperasi.



Gambar 3. 22 Rapat Inisiasi Pembentukan Badan Usaha Di Kabupaten Mojokerto

o) Rapat Persiapan Inisiasi Pembentukan Badan Usaha Di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Banyuwangi 26 Maret 2024

Di Desa Bulu Meduro, Kabupaten Tuban belum ada koperasi perikanan tetapi ada koperasi wanita. Desa Bulu Meduro terdapat 12 KUB dan 7 poklhasr dengan total anggota semua 96 orang di mana per KUB 10 orang/lokasi (total 120 anggota KUB). Dipastikan bahwa anggota koperasi yang akan dibentuk bukan merupakan pengurus koperasi lain yang telah mati suri. Di Kabupaten Tuban terdapat beberapa koperasi yang mati suri dan ada beberapa yang sudah diaktifkan kembali. Dinas Perikanan Kabupaten siap untuk mendampingi koperasi baik dalam proses pembentukan

maupun dalam pengelolaan Kalamo namun sampai saat ini belum ada persiapan untuk pembentukan koperasi untuk pengelola Kalamo.

Untuk Kabupaten Banyuwangi lokasi Kalamo berada di Desa Lateng namun Koperasi Konsumen Mandar Berkah Bahari ada di Desa Mandar yang berusia belum 1 tahun dan sedang mengelola TPI. Jarak antara Desa Lateng dengan Desa Mandar hanya sekitar 200 meter. Terdapat kesepakatan internal sementara bahwa meskipun Koperasi terletak di Desa Mandar tetapi titik lokasi Kalamo di Desa Lateng, karena Bantuan Pemerintah terletak diantara kedua desa tersebut. Perlu dilihat bidang usaha yang dimiliki koperasi dan Ditjen PDSPKP akan memfasilitasi penambahan KBLI terkait penanganan, pengolahan dan pemasaran. Koperasi Konsumen Mandar Berkah Bahari belum melakukan RAT (belum 1 tahun) dan belum melakukan laporan pertanggungjawaban kepengurusan koperasi.



Gambar 3. 23 Persiapan Inisiasi Pembentukan Badan Usaha Di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Banyuwangi

- p) **Rapat Pra pembentukan lembaga usaha hasil KP dalam rangka peningkatan kelembagaan tanggal 25 - 26 Maret 2024 di Kabupaten Tegal dan Kota Pekalongan.**

Gapokkan Rukun Sejahtera adalah calon koperasi yang diajukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tegal yang mempunyai usaha pemindangan dan pengasapan

ikan. Saat ini sudah mempunyai kegiatan pra-koperasi dengan menyediakan kebutuhan untuk proses produksi para anggotanya. Berdasarkan diskusi, Dinas Koperasi menyarankan agar nantinya jenis koperasi yang akan didirikan adalah koperasi konsumen.

Rapat pra-pendirian koperasi dikota pekalongan dihadiri 3 poklahsar yaitu: Poklahsar Matsya Marine Jaya, Poklahsar Moya Bahari Perdana, dan KUB Segara Jaya, Dari ketiga kelompok tersebut hanya Poklahsar Matsya Marine Jaya yang siap untuk ditingkatkan kelembagaan usahanya menjadi koperasi. Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang perkoperasian dari Dinkop setempat dan dan dilanjutkan dengan penyusunan draft AD/ART dan draft Berita Acara pembentukan koperasi.

Adapun lembaga usaha yang telah ditingkatkan kapasitasnya pada triwulan I Tahun 2024, yaitu:

- 1) Koperasi Lele Mambo Berseri di Kabupaten Sampang (peningkatan kapasitas lembaga);
- 2) Koperasi Asap Indah Wonosari di Kabupaten Demak (penguatan kapasitas lembaga);
- 3) Koperasi Pijarmas di Kabupaten Demak (penguatan kapasitas lembaga); dan
- 4) Koperasi Sri Say Dem di Kabupaten Demak (penguatan kapasitas lembaga).

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp146.161.786,- atau setara dengan 7,90% dari total pagu sebesar Rp1.850.000.000,- Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 8,88% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 7,90%.

3.2.5 Sasaran Strategis 5

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha

IK6. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)

Penumbuhan dan pembinaan wirausaha hasil KP dilaksanakan dalam rangka mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan pembinaan terhadap wirausaha bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebagai upaya mendukung peningkatan rasio kewirausahaan serta keberlanjutan usaha wirausaha baru dan wirausaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini terlaksananya fasilitas pendampingan dan pembinaan UMKM sektor hasil kelautan dan perikanan.

Jumlah wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan dibina pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 875 wirausaha, pada triwulan I tahun 2024 target yang ditetapkan sebanyak 150 UMKM/wirausaha dan realisasi capaian pada TW I yaitu sebanyak 150 UMKM/Wirausaha atau setara dengan 100% terhadap target, apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah sebesar 17,14%. Capaian kewirausahaan tahun 2024 bila dibandingkan dengan capaian di periode yang sama pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 87,5 %, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 capaian wirausaha terealisasi sebanyak 80 UMKM sedangkan pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 150 UMKM.

Tabel 3. 7 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Wirausaha Hasil KP yang Ditumbuhkan dan Dibina (UMKM)	150	183	80	875	150	203	80	150	100	110,93	100	17,14

Untuk mendukung capaian tersebut, kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2024, meliputi:

1. Kegiatan Koordinasi dan Identifikasi Kebutuhan Calon Wirausaha di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, dilaksanakan pada tanggal 5-8 Maret 2024 kegiatan berfokus untuk mendapatkan baseline data awal dari UMKM yang akan di naikan kelas. Kegiatan dimulai dengan berkoordinasi dengan dinas Kabupaten Bekasi dan Karawang untuk memetakan daerah industri dan menggali informasi

UMKM yang berpotensi. UMKM yang menjadi terpilih untuk mendapatkan baseline data

- a. Enza Lele memiliki nilai aset Rp 300 juta, dan mempunyai produk frozen fillet lele on skin less dan skin on, lele furai, lele asap
- b. UD Anugrah Memiliki nilai aset Rp 2 Milyar dan mempunya produk frozen food, keripik otak-otak.
- c. Bekasi Presto memiliki nilai aset Rp 100 juta dan mempunya produk bandeng presto, otak-otak Bandeng, pindang bandeng
- d. PT. KUI Indofishskin memiliki nilai aset Rp 77 juta dan mempunya produk salmon skin chips, dori skin chips
- e. Race Lele memiliki nilai aset Rp 1 Milyar dan mempunya produk krupuk ikan tulang lele, basreng ikan lele
- f. Fajar Barokah memiliki nilai aset Rp 110 Juta dan mempunya produk Rengginang, Abon ikan, stik ikan



Gambar 3. 24 Dokumentasi Kegiatan Penumbuhan dan Pembinaan Wirausaha Kelautan dan Perikanan

2. Dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Baru, serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Direktorat Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP melaksanakan kegiatan pemberdayaan usaha melalui UMKM Naik Kelas Bidang

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Sleman pada tanggal 4-8 Maret 2024.

- a. Kegiatan di Kabupaten Jepara dan dihadiri 10 UMKM Dengan didampingi dinas perikanan kabupaten Jepara. Terdapat 4 UMKM yang bisa di target kan untuk naik kelas.
 - Poklahsar Mina Barokah memiliki nilai aset Rp 100 juta, dan mempunyai produk Lele Bumbu
 - Wafiq food memiliki nilai aset Rp 100 juta, dan mempunyai produk Olahan Ikan
 - Dapur Rasa Jepara memiliki nilai aset Rp 15 juta, dan mempunyai produk Stik Ikan
 - Poklahsar Kartini memiliki nilai aset Rp 150 juta, dan mempunyai produk Ikan Asap
- b. Kegiatan di Kabupaten Kendal dengan mengidentifikasi sebanyak 6 UMKM di bidang pengolahan perikanan. Dengan didampingi dinas perikanan kabupaten Kendal. Terdapat 6 UMKM yang bisa di target kan untuk naik kelas dari kelas mikro menuju ke kelas kecil
 - Bandeng MORIS/Poklahsar Mina Bangun Mandiri memiliki nilai aset < Rp 100 juta, dan mempunyai produk Olahan Ikan Bandeng Otak² MORIS' Pepes' Dendeng' Presto
 - Empuk Saji Citrohani memiliki nilai aset Rp 100 juta, dan mempunyai produk Olahan Ikan Bandeng
 - RND FOOD/Poklahsar Mina Segara memiliki nilai aset Rp 50 juta, dan mempunyai Ikan Kering
 - Azzahra mandiri memiliki nilai aset Rp 10 juta, dan mempunyai produk Rengginang seafood
 - Poklahsar Sumber Laut memiliki nilai aset Rp 5 juta, dan mempunyai produk Pepes ikan, Bakso ikan
 - Asna Nusantara Food memiliki nilai aset Rp 50 juta, dan mempunyai produk Sambal Cakalang, Cumi, Kerang, Teri, Rebon
- c. Kegiatan di Kabupaten Sleman dengan mengidentifikasi sebanyak 2 UMKM di bidang pengolahan perikanan. Dengan didampingi dinas perikanan kabupaten Kendal. Terdapat 2 UMKM yang bisa di target kan untuk naik kelas

- Orange Food memiliki nilai aset Rp 400 juta, dan mempunyai produk Pepes Ikan Tuna, Galantin Ikan Tuna, Otak-Otak Ikan Tuna, Bakso Ikan Tuna, Naget Ikan Tuna, Kaki Naga Ikan Tuna, Tahu Bakso Ikan Tuna, Pempek Ikan Marlin, Pempek Ikan Tenggiri, Ikan Marlin Bumbu Rujak, Fillet Ikan Tuna, Fillet Ikan Nila, Fillet Ikan Marlin, Fillet Ikan Mahi-Mahi, Galantin Ayam, Dimsum Ayam, Naget Ayam, Galantin Sapi, Bakso Sapi
- Citra Rasa memiliki nilai aset Rp 550 juta, dan mempunyai produk Keripik ikan Sidat

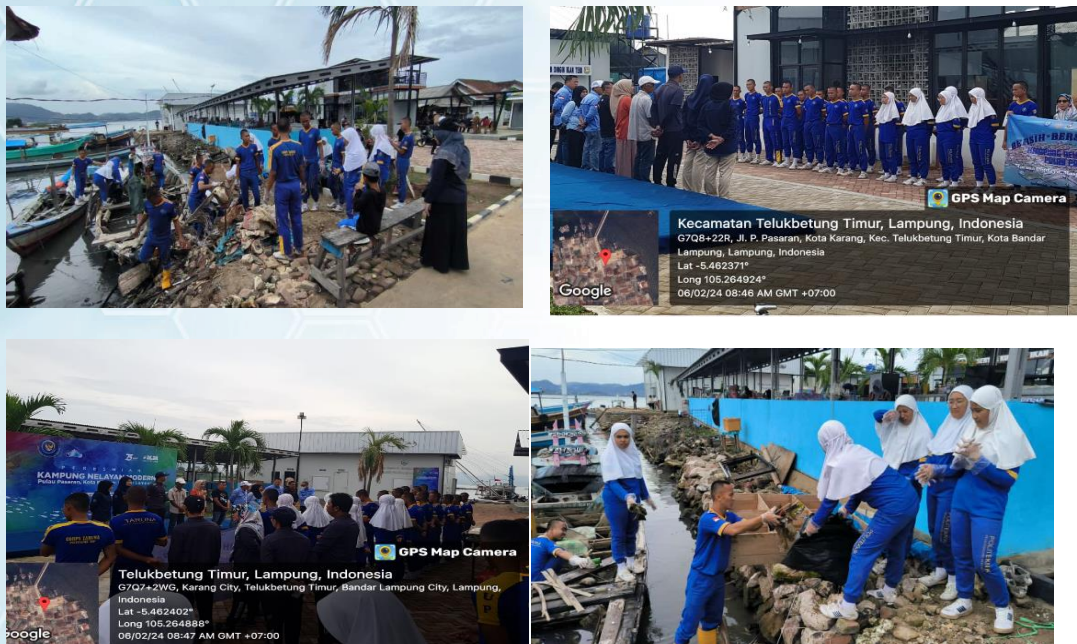


Gambar 3. 25 Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Baru, serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

3. Kegiatan peresmian Pulau Pasaran telah dilakukan kunjungan kerja ke Pulau Pasaran Bandar Lampung pada tanggal 5-8 Februari 2024 dengan hasil sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Bersih Pantai dan Lingkungan Kawasan Kampung Nelayan Modern (KALAMO) Pulau Pasaran
 - a) Pulau Pasaran merupakan sentra pengolahan teri, dimana seluruh aktivitas masyarakat mengolah teri jenis teri nasi, bontiauw dan jengki yang selanjutnya

di pasarkan ke Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya. Untuk menghasilkan kualitas teri yang baik maka diperlukan lokasi pengolahan yang higienis dan terbebas dari bakteri yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan.

- b) Kegiatan bersih pantai dan lingkungan kawasan KALAMO dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2024 dan dipimpin oleh Direktur Usaha dan Investasi dan diikuti oleh 150 orang yang terdiri dari perwakilan DJPDS dan DJPT, 30 Taruna Politeknik AUP Lampung, Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dan Masyarakat Pulau Pasaran
- c) Pada kegiatan ini Direktur Usaha dan Investasi dan Kabid PRL Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi mengedukasi pentingnya kebersihan pantai dan lingkungan untuk menghasilkan produk teri yang higienis. Pulau Pasaran sebagai contoh kawasan sentra penghasil teri di Indonesia maka untuk menjaga *image* produk teri berkualitas maka lingkungan juga harus bersih dan sehat.



Gambar 3. 26 Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Bersih Pantai dan Lingkungan Kawasan Kampung Nelayan Modern (KALAMO) Pulau Pasaran

- Peresmian Kampung Nelayan Modern (KALAMO) Pulau Pasaran
 - a) Kegiatan peresmian KALAMO dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2024. Pada kegiatan peresmian Direktur Usaha dan Investasi ditunjuk sebagai ketua panitia
 - b) Peresmian Kalamo dilakukan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Gubernur Lampung, Walikota Lampung dan Dirjen PDS mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan
 - c) Hadir tamu undangan pada acara peresmian diantaranya Bapak-Ibu Pejabat Eselon II lingkup KKP atau yang mewakili beserta jajarannya dan bapak-Ibu perwakilan dari Kementerian/Lembaga dan Akademisi
 - d) Kampung Nelayan Modern merupakan program yang mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial masyarakat menjadi lebih produktif dan mandiri, dengan seluruh dimensinya melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat dengan penerapan *social engineering*.
 - e) Berdasarkan potensi Pulau Pasaran yang dimiliki, dengan luas wilayah sekitar 13 hektar yang dihuni sekitar 1.500 penduduk, dengan pekerjaan utama hampir 100% di bidang usaha perikanan, terutama pengolah ikan teri, maka sudah semestinya Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir di Pulau ini dengan berbagai program dan kegiatannya.
 - f) Oleh karena itu, pada tahun 2023 KKP telah membangun beberapa sarpras perikanan dan pendukungnya, antara lain: pembangunan 9 unit kios nelayan, 1 unit sentra kuliner ikan, 1 unit gedung beku portabel suhu chilling kapasitas 10 ton, 1 unit rumah pengering ikan higienis kapasitas 500 kg, 1 unit kendaraan berefrigerasi, 4 unit motor roda tiga Tossa, pembuatan gapura, perbaikan jalan umum sekitar 2,4 km, rehabilitasi 1 unit balai pertemuan nelayan, dan 7 titik penerangan jalan umum;
 - g) Saat ini semua sarpras tersebut telah dimanfaatkan dan dikelola oleh Koperasi Produsen Nelayan Kalaju Pulau Pasaran. Hal ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat Pulau Pasaran, serta pendampingan dari Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas masyarakat melalui bimbingan teknis mutu dan pengolahan, fasilitasi kemudahan perijinan berusaha, akses permodalan, kelembagaan

dan kemitraan usaha, serta pendampingan promosi dan pemasaran atas produk yang dihasilkan.



Gambar 3. 27 Dokumentasi Kegiatan Peresmian Kampung Nelayan Modern (KALAMO) Pulau Pasaran

4. Bimbingan teknis kewirausahaan dan pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI telah dilaksanakan di Kabupaten/Kota Kediri, Palembang, Kupang, Majalengka, Banyumas, Sumbawa, Bogor, Lampung Tengah, Pinrang, Sambas, Tulang Bawang Barat, Jombang, Karawang, Tebo, Maluku Tengah. Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan dihadiri oleh Anggota DPR-RI, perwakilan pejabat dari Ditjen PDSPKP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Setempat, Lembaga Keuangan Setempat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat, UMKM Terbaik setempat. Hadir sebagai peserta pelaku usaha yang terdiri atas pembudidaya ikan air tawar, nelayan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan setempat. Pada kegiatan bimtek ini KKP juga bekerjasama dengan DPMPSTP setempat mengadakan gerai layanan Perizinan yaitu berupa pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB); serta perwakilan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu terkait pengurusan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Selain itu, juga dihadirkan narasumber dari lembaga keuangan perbankan (BRI dan BNI) dalam rangka sosialisasi akses

pembiayaan usaha; serta narasumber dari praktisi manajemen/ UMKM teladan/wirausaha mapan yang menyampaikan materi terkait manajemen usaha mikro kecil, *success story*, dan memberikan motivasi kepada calon wirausaha kelautan dan perikanan. Wirausaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang telah dilakukan pembinaan pada triwulan I tahun 2024 terlampir.



Gambar 3. 28 Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan di kota Kediri, Kota Kupang, dan Kota Pinrang

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp1.794.651.042,- atau setara dengan 23,70% dari total pagu sebesar Rp7.572.500.000,- Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp18.921.353,-. Dalam hal ini persentase penggunaan anggaran lebih besar daripada persentase realisasi capaian sebesar 17,14%, hal ini dikarenakan pada triwulan I kegiatan lebih difokuskan pada kegiatan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan kegiatan identifikasi.

IK7. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha (UMKM)

Direktorat Jenderal PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP untuk mendukung keberlanjutan usaha, dengan melakukan fasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha kelautan dan

perikanan melalui pendampingan dalam mengakses kredit program yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan, serta pengelolaan keuangan sederhana.

Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha adalah Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi dan intermediasi dalam kegiatan pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan, yang terdiri atas fasilitasi akses pembiayaan kredit program dan/atau fasilitasi pada pendampingan Gerai Investasi dan layanan usaha (GISELA) dan kegiatan pemberdayaan lainnya (fasilitasi kemitraan, perizinan dan kelembagaan).

Tabel 3. 8 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha (UMKM)	150	-	-	2565	150	-	-	150	100	-	-	5,85

Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 2.565 UMKM, pada triwulan I tahun 2024 target yang ditetapkan sebanyak 150 UMKM dan realisasi capaian pada TW I yaitu sebanyak 150 UMKM atau setara dengan 100% terhadap target, apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah sebesar 5,85%. Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu, karena formulasi penghitungan indikator kinerja yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Fasilitasi akses pembiayaan yang dilakukan berupa edukasi literasi keuangan dan pendampingan untuk menilai status kelayakan usaha UMKM dalam mengakses pembiayaan, baik ke lembaga keuangan bank ataupun nonbank di lokus-lokus prioritas KKP ditambah dengan Fasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha lainnya melalui kegiatan GISELA, Kemitraan, perizinan dan kelembagaan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja UMKM KP yang difasilitasi pemberdayaan usaha pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

1. Terlaksananya rapat koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan :

a) Rapat Koordinasi Pembiayaan dengan Lembaga Keuangan, tanggal 23 Januari 2023

Rapat koordinasi kinerja pembiayaan usaha sektor KP dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 di Ruang Rapat Akses Pasar Ditjen PDSPKP yang dipimpin oleh Katimja Akses Pembiayaan dan dihadiri oleh perwakilan BNI, BRI, BSI, Bank Mandiri, Bank Muamalat, dan PT. PNM. Dalam pembahasan dilaporkan oleh perbankan menyampaikan pada tahun 2023 penyaluran KUR menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya karena ada perubahan kebijakan Peraturan Menteri Perekonomian No 1 tahun 2023 terkait bunga KUR (3% menjadi 6%) sehingga pencairan tertunda.

Pada rapat disampaikan beberapa komitmen dari lembaga pembiayaan dalam rangka pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan sebagai berikut : (1) Bank Muamalat menyampaikan selama ini lebih banyak menyalurkan pinjaman kepada sektor pendidikan dan rumah sakit, dan berminat untuk mempelajari skema pembiayaan untuk usaha sektor kelautan dan perikanan; (2) BNI siap bekerjasama memberikan sosialisasi kepada koperasi/kelompok penerima bantuan pemerintah terkait skema kredit usaha yang bisa diakses oleh calon debitur; (3) Bank Mandiri siap membantu penyaluran KUR, dan perlu mempelajari lebih lanjut terkait pola pembiayaan terhadap model bisnis antara mitra dengan kelompoknya ataupun dengan perusahaan atau offtakernya; (4) PT. PNM menyampaikan informasi program klaster pembiayaan “kampung madani” dan pemberdayaan kapasitas usaha, sehingga bisa bersinergi dengan KKP untuk menargetkan penyaluran kepada usaha sektor KP berbasis klaster dan gender perempuan, termasuk kepada penerima bantuan pemerintah; (5) Direktorat PU akan menyampaikan data kelompok/koperasi penerima bantuan pemerintah kepada perbankan dan PT PNM untuk dapat ditindaklanjuti dengan menawarkan program fasilitasi akses permodalan kepada calon nasabah dimaksud.

b) Rapat Koordinasi Identifikasi Lokasi Potensial Akses Pembiayaan, 29 Januari 2023

Rapat dibuka oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dipimpin oleh Katimja Akses Pembiayaan yang dihadiri oleh perwakilan 15 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Puslatluh. Tujuan dari rapat ini adalah agar semua pihak dapat terlibat dalam kegiatan untuk mencapai target 2024 dan perlu didorong pola-pola pembiayaan yang selama ini telah diakses oleh masyarakat dan bisa dipercepat realisasi pembiayaan bekerjasama dengan perbankan dan non bank.

Pimpinan rapat menyampaikan paparan mengenai IKU Ditjen PDSPKP 2024 dan target pembiayaan usaha 2024, syarat calon lokasi klaster, gambaran capaian TPUKP di masing-masing Provinsi dan contoh lokasi klaster pembiayaan yang berhasil.

Adapun calon lokasi sementara yang sudah diusulkan oleh 8 Dinas KP provinsi sebagai berikut:

- Riau : Pekanbaru
- Kalimantan Utara : Tarakan
- Jawa Tengah : Jepara, Demak, Banjarnegara, Kendal, Semarang dan Boyolali.
- Jawa Timur : Sidoarjo, Ngawi, Kediri, banyuwangi, Sampang
- DIY : Pelabuhan perikanan Gesing kampung budidaya nila dan lele di kab Sleman dan Bantul (Plered dan Pandaan), Pantai Baru Bantul, Ngreanean Gunung Kidul, Glagah Kulon Progo.
- Kalimantan Timur : Anggana dan Loa Kulu Kab Kutai Kartanegara
- Sulawesi Tengah : Sigi dan Parigi Moutong
- Sulawesi Selatan : Kab Bantaeng, Bone, Luwu, Pangkajene Kepulauan, Pinrang, Takalar, Wajo, Toraja Utara, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Sinjai dan Soppeng.

Beberapa tindaklanjut yang dapat dilaksanakan setelah rapat ini adalah perlunya koordinasi antara Dinas Provinsi dengan Dinas Kabupaten/Kota dan penyuluh di daerah masing-masing untuk informasi calon lokasi klaster untuk kemudian Dinas KP Provinsi dapat menyampaikan usulan lokasi klaster berdasarkan kriteria termasuk target usulan kelompok yang akan ditingkatkan kapasitas kelembagaannya.

c) Rapat Koordinasi Pembiayaan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan pada lokasi Kampung Nelayan Modern di Kabupaten Tuban, 14 Maret 2024

Rapat Koordinasi dipimpin oleh Katimja Pembiayaan dan dihadiri oleh perwakilan Bank Mandiri Pusat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban, penyuluh perikanan Tuban, dan Katimja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi. Rapat bertujuan untuk sinergitas dukungan fasilitasi pembiayaan dari Bank Mandiri untuk pelaku usaha perikanan di Desa Bulu Meduro, yang terdiri dari 12 Poklamsar, 1 BUMDES, 14 KUB Nelayan, dengan kebutuhan permodalan sebesar Rp50-250 juta bagi nelayan, dan Rp500 juta bagi pengolah.

Perbankan dalam hal ini Bank Mandiri antusias untuk bisa masuk ke pembiayaan ekosistem perikanan yang terintegrasi dari pembudidaya/pengolah dengan offtakernya. Potensi pembiayaan oleh Bank Mandiri cukup besar melalui 4 cabangnya di Tuban telah menyalurkan pembiayaan kepada 160 debitur dengan total limit kredit sebesar Rp32,2 miliar, dan telah memetakan 6 lokasi potensial di Tuban, dengan bidang usaha yang bisa dibiayai adalah penangkapan, pengolahan, pemasaran, dan budidaya.

Sebagai tindaklanjut berikutnya adalah Bank Mandiri akan berkoordinasi dengan cabang Tuban untuk melakukan survei dan profiling pelaku usaha yang ada di lokasi Kalamo tersebut, bersama dengan Tim KKP dan DKP Tuban.

2. Terlaksananya identifikasi dan koordinasi peluang fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha di Kota Semarang, Kab. Solo, Kab. Boyolali, Kab. Gresik, Kab. Tuban, Kab. Banyuwangi dan Bali.

a) Koordinasi dan Identifikasi di Kota Semarang, Tanggal 6-8 Februari 2024

Koordinasi dilakukan dengan Tim Bidang Pengembangan Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terkait program dan lokasi usulan klusterisasi pembiayaan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini juga berkoordinasi dengan tenaga konsultan CSR dari Astra Group dan BRI, Bapak Abdul Hamid dari PT Mitra Distribusi Lestari atau MDL Food, yang telah memfasilitasi pendampingan dalam hal penyusunan program kegiatan pemberdayaan usaha dan penyaluran dana CSR dari penyandang dana kepada UMKM binaannya. MDL Food merupakan perusahaan yang bergerak di bidang research, development, dan distribusi produk UMKM dan saat ini fokus pada industri pangan.

Tim KKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sangat menghargai keberadaan tenaga konsultan ini karena bisa membantu memfasilitasi

pendampingan terhadap UMKM perikanan lebih banyak lagi untuk dikurasi dan mendapatkan pembinaan secara menyeluruh terkait aspek usahanya mulai dari efisiensi biaya produksi, tahapan produksi dan *quality control*, desain pengemasan yang menarik, jangkauan pemasaran, promosi secara offline dan online, hingga memiliki harga jual yang kompetitif. Dalam hal ini MDL Food membantu pelaku UMKM pangan untuk naik kelas dan mengembangkan usahanya secara mandiri maupun kemitraan usaha, melalui tahapan:

- Membangun kemitraan yang positif dengan UMKM
- Pendampingan dan pemberdayaan yang intensif
- Melakukan riset pasar
- Pendanaan dan investasi untuk pengembangan kapasitas bisnis
- Pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan terbuka terhadap perubahan

Pada kesempatan ini Tim dari Direktorat Usaha dan Investasi menyampaikan paparan terkait program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kebijakan Direktorat Jenderal PDSPKP terkait kegiatan klusterisasi pembiayaan. Tim juga menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan pertemuan pada Minggu ke III Februari 2024 antara para pelaku UMKM perikanan di Kota Semarang dan sekitarnya yang terdiri dari anggota Klaster Bandeng, binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, binaan dari konsultan MDL Food, dengan narasumber perbankan/non bank, dan narasumber perijinan berusaha serta narasumber tentang GMP dan SSOP.

b) Koordinasi dan Identifikasi di Kab Solo dan Boyolali, Tanggal 5-7 Februari 2024

Kegiatan identifikasi diawali dengan rapat koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Solo, dan dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Praktisi Tenaga Pendamping Usaha Kabupaten Solo-Bayolali Bapak Zani Suparlan. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menggali informasi, pemetaan potensi wilayah dan analisa kebutuhan untuk pembentukan klaster pembiayaan, Kabupaten Solo dan Boyolali serta potensi sinergitas kegiatan dari masing-masing instansi terkait.

Berdasarkan hasil penggalian informasi dan diskusi, diperoleh beberapa poin sebagai berikut :

- Komoditas unggulan wilayah Kemusu dan sekitarnya;

Komoditas unggulan wilayah Kemusu adalah Budidaya ikan nila dan pengolahan ikan asap, total pelaku usaha pengasapan sebanyak 1 kelompok pengasap namun produksinya masih sangat tergantung dengan pasokan sumber bahan baku. Bahan baku ikan tersebut didapatkan langsung dari nelayan yang merupakan warga sekitar waduk kedung ombo.

- Komoditas unggulan wilayah Tegalrejo dan sekitarnya

Komoditas unggulan wilayah Tegalrejo adalah Budidaya ikan lele dan pengolahan ikan lele, total pelaku usaha pengolahan sebanyak 3 kelompok. Bahan baku ikan tersebut didapatkan langsung dari pembudidaya yang merupakan warga sekitar tegalrejo.

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan pemerintah daerah: (1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manajemen usaha (perizinan, akses pembiayaan, literasi keuangan dan kemitraan); (2) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peningkatan kualitas produk (packaging masih menggunakan daun jati dan kertas bekas); (3) Pemasaran masih bersifat tradisional, belum menggunakan media *marketplace*.

Rencana tindak lanjut dari kegiatan Identifikasi ini adalah : (1) Menjadwalkan kegiatan fasilitasi akses pembiayaan di Kabupaten Boyolali, kegiatan tersebut dilaksanakan pada akhir bulan Februari ataupun awal bulan Maret; (2) Melakukan koordinasi dengan Eselon II lain lingkup Ditjen PDSPKP dalam rangka sinergitas kegiatan di Kabupaten Boyolali; (3) Rapat koordinasi dengan PT. PNM dan Pt. BNI 46 dalam rangka dalam rangka persiapan kegiatan sebelum pelaksanaan fasilitasi akses pembiayaan.

c) Koordinasi dan Identifikasi di Bali, Tanggal 23-24 Februari 2024

Kegiatan identifikasi peluang akses pembiayaan dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 Februari 2024 di Bali dengan melakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), Kepala Pos Pelayanan PPN Pengambengan, kunjungan ke Sentra Pemindangan Ikan di Kabupaten Klungkung Bali, dan kunjungan ke PPI Kedonganan. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Dinas menyambut baik bila KKP akan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis peluang akses pembiayaan karena selama ini belum pernah ada. Dinas mengusulkan untuk topiknya juga meliputi materi diversifikasi produk dan pasar. Adapun potensi UMKM yang bisa difasilitasi adalah 200 UMKM dengan ragam produk olahan sebagian besar dari ikan tongkol dan cakalang sedangkan untuk olahan tuna sangat sedikit antara lain kerupuk kulit ikan tuna dan abon tuna.

2. Pertemuan dengan Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI)

Anggota ATLI sekitar 152 orang yang terdiri dari :1) 22 perusahaan yang punya UPI dan punya kapal, 2) 89 perorangan yang punya kapal, 3) 8 perusahaan yang punya UPI tapi tidak punya kapal dan 4) perusahaan yg tidak punya kapal dan tidak punya UPI (perusahaan dok kapal, agen logistik). Terdapat 650 kapal dari 22 perusahaan tersebut dengan proporsi 25% kapal berukuran di bawah 30 GT dan 75% berukuran diatas 30 GT. Kebutuhan modal untuk 1 (satu) kapal penangkap tuna berlayar selama 6 bulan sekitar 2,5 Milyar.

3. Kunjungan ke Pos Pelayanan PPN Pengambengan di Benoa

Pos Pelayanan PPN Pengambengan di Benoa berdiri sejak tahun 2010 yang mempunyai tugas layanan *logbook* penangkapan ikan, inspeksi pembongkaran ikan, SHTI, penerbitan *IOTC Bigeye Statistical Data*, penerbitan *ICCAT Swordfish Statistical Document*, CDS CCSBT, penerbitan surat keterangan berpangkalan dan pendaratan ikan, penerbitan surat keterangan kepatuhan untuk pendaftaran RFMO, CCSBT dan IOTC, dan input data PIPP. Jumlah kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikannya di Pelabuhan Benoa pada tahun 2023 sekitar 1.138 kapal. Jumlah hasil tangkapan sebesar 47.268 ton dengan komoditas tangkapan antara lain cumi-cumi, tuna albacore, cakalang, madidihang, tuna mata besar, tuna sirip biru dan ikan lainnya.

4. Kunjungan ke Sentra Pemindangan Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung

Sentra pemindangan Desa Kusamba memiliki 77 pemindang yang memproduksi pindang ikan tongkol sekitar 150 kg per hari. Bahan baku ikan tongkol berasal dari hasil tangkapan nelayan yang menggunakan kapal jukung di wilayah Klungkung maupun Karangasem dengan harga sekitar 12 – 15 ribu/kg. Pemindang di sentra pemindangan belum memiliki NIB karena

ketakutan mereka akan dikenai pajak bila memiliki NIB. Terdapat potensi pembiayaan sekitar Rp. 173.250.000,-/hari di sentra pemindangan ini. Perbankan yang sudah menyalurkan kreditnya adalah Bank Pembangunan Daerah.

5. Pertemuan dengan penyuluh di PPI Kedonganan

Terdapat 2 KUB di PPI Kedonganan yaitu KUB Kerta Bali dan KUB Putra Bali. KUB Kerta Bali memiliki 118 kapal jukung, sedangkan KUB Putra Bali memiliki 25 kapal jukung. Jumlah nelayan yang tergabung dalam KUB Kerta Bali sebanyak 59 nelayan, sedangkan di KUB Putra Bali sebanyak 37 nelayan. Alat tangkap yang digunakan adalah *gillnet* dengan hasil tangkapan antara lain baby tuna, tongkol, kenyar, cumi-cumi, tengiri, kakap dan kerapu sebanyak 50 – 100 kg/kapal. Nelayan melakukan penangkapan ikan dengan metode *one day fishing* dan membutuhkan modal sekitar 750 – 800 ribu per hari untuk 1 kapal. Sehingga terdapat potensi pembiayaan sekitar Rp. 114.400.000,- dalam sehari. Selama ini nelayan di Kedonganan mengakses pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Daerah (LPD) dengan bunga sekitar 13% karena mudahnya persyaratan yaitu menggunakan surat keterangan kepala desa adat.

6. Tindak lanjut yang diharapkan adalah (1) Perlu kegiatan sosialisasi potensi dan peluang pembiayaan industri tuna yang sangat besar kepada perbankan untuk mendapatkan dukungan lebih; (2) Sosialisasi NIB dan akses pembiayaan kepada para pemindang di sentra pemindangan di Desa Kusamba, Klungkung; (3) Sosialisasi alternatif akses pembiayaan perbankan dan non bank dengan bunga yang lebih rendah kepada nelayan di Kedonganan.

d) Koordinasi dan identifikasi peluang fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha di Kabupaten Banyuwangi tanggal 21-23 Maret 2024

Kegiatan identifikasi dilaksanakan di lokasi Kalamo (Kampung Mandar dan Lateng) serta Muncar dengan melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Penyuluh, Ketua Koperasi Mandar Berkah Bahari, Ketua KUB Lateng (KUB Sumber Laut dan KUB Fajar Timur), Poklamsar Mina Upa Karya, Wakil Ketua HNSI Muncar, Ketua Gapoklamsar Bina Lestari, Kepala PPP Muncar dan Direktur UD. Putra Samudra.

Di Kampung Mandar terdapat 2 Poklahsar dan 3 KUB dengan jumlah nelayan sebanyak 502 orang, sedangkan di Lateng terdapat 3 KUB dengan jumlah nelayan sebanyak 302 orang. Saat ini akan dibentuk 1 Poklahsar di Lateng dengan anggota sekitar 20 orang.

Koperasi Mandar Berkah Bahari merupakan koperasi yang dibentuk pada tahun 2022 yang menaungi 5 KUB yaitu 2 KUB di Kampung Mandar, 2 KUB di Lateng dan 1 KUB di Panderejo dengan anggota sekitar 20 orang. Usaha yang dijalankan baru bagi hasil sewa kapal bantuan KKP dan penarikan retribusi TPI Mandar. Melalui program Kalamo, akan dibangun coldstorage dengan kapasitas 20 ton di TPI Mandar dan rencana koperasi Mandar Berkah Bahari yang akan mengelola.

Tindak lanjut yang diharapkan (1) perlu dilaksanakan Fasilitasi akses pembiayaan kepada nelayan, supplier dan poklahsar di Kampung Mandar, Lateng dan Muncar; (2) Penguatan kelembagaan koperasi Mandar Berkah Bahari agar mampu mengelola coldstorage dan unit usaha lainnya; (3) Terdapat potensi kemitraan usaha antara koperasi Mandar Berkah Bahari dengan UD. Putra Samudra dalam pendampingan pengelolaan coldstorage. UD. Putra Samudra merupakan salah satu pengusaha coldstorage yang sukses mengelola coldstorage 300 ton.

e) Koordinasi identifikasi kluster pembiayaan Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, dan Kota Surabaya pada tanggal 18-21 Maret 2024

1. Kurasi UMKM naik kelas di Kabupaten Gresik

Kurasi produk perikanan dilakukan untuk memotret UMKM secara detail per produk yang dimiliki guna mengetahui pendampingan dan/atau pelatihan yang dibutuhkan oleh UMKM agar dapat naik kelas. UMKM yg dikurasi rata-rata memproduksi satu jenis olahan kerupuk ikan laut dengan volume produksi sebanyak 1,25 ton per bulan, dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang per usaha. Permasalahan yang dialami oleh UMKM tersebut adalah keterbatasan aspek pemasaran dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia UMKM. Saran dari kurator yang dapat diusulkan adalah pembinaan UMKM melalui pelatihan manajemen keuangan usaha yg baik dan benar, pelatihan diversifikasi produk perikanan lain selain kerupuk,

sosialisasi akses pembiayaan dan program perluasan pasar melalui gemarikan.

2. Identifikasi pembentukan ekosistem pembiayaan di Kabupaten Tuban

Pada kunjungan tersebut, Tim Direktorat UI bertemu dengan Kepala Desa Bulu Meduro dan perwakilan beberapa pelaku usaha yang ada di lokasi Kalamo. Saat ini terdapat 14 KUB nelayan, 12 poklamsar dan 1 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Intimina Desa Bulumeduro yang mengelola usaha antara lain: rumah produksi, pengemasan, labeling, pemasaran produk olahan, swalayan, dan rumah kuliner di lahan desa. Kebutuhan pembiayaan usaha pengolahan berkisar Rp5 - 50 juta yang digunakan untuk modal kerja. Sebagai tindak lanjut penetapan Kalamo, akan dibentuk koperasi beranggotakan perwakilan KUB nelayan dan poklamsar di Desa Bulu Meduro yang akan berperan sebagai pengelola bantuan KKP di lokasi Kalamo sekaligus koperasi simpan pinjam. Untuk itu aparat desa meminta dukungan fasilitasi penguatan kelembagaan usaha dari Dit UI.

3. Koordinasi kegiatan dengan DKP Provinsi Jawa Timur

Pertemuan dengan DKP Provinsi Jawa timur bertujuan untuk koordinasi dalam sinergi program kegiatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah Jawa Timur yaitu kegiatan kurasi dan fasilitasi akses pembiayaan dan Gisela. Dalam pertemuan tersebut Dinas KP Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk membantu mengkoordinasikan kepada UMKM yang menjadi target kurasi dan akan bersinergi dengan dinas dan pemerintah Desa Bulumeduro Tuban untuk menyiapkan pembentukan kelembagaan koperasi sebagai pengelola Kalamo.

Dalam rangka tahun tuna terdapat pelaku pengolah tuna dan derivatnya di Pacitan yg telah mengakses KUR senilai 250 juta, yg digunakan untuk membuat *cold storage*, sebagai contoh *success story* sektor pembiayaan untuk mendukung launching tahun tuna.

3. Pelaksanaan Fasilitasi Akses Pembiayaan Di Kota Semarang dan di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

a. Temu fasilitasi akses pembiayaan kredit kelautan dan perikanan di Semarang, 27 Februari 2024

Acara dibuka oleh Direktur Usaha dan Investasi secara daring, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan DKP Kota Semarang, Kab Semarang, Kab Kendal, penyuluh perikanan, serta UMKM perikanan dari Kota Semarang, Kab Semarang, Kendal, dan Demak. Acara bertujuan untuk memberikan edukasi literasi keuangan serta fasilitasi akses pembiayaan dan kelembagaan usaha KP dalam rangka mendorong UMKM KP naik kelas kepada para pelaku UMKM di Jawa Tengah.

Narasumber yang hadir berasal dari : 1) BNI terkait pembiayaan BNI Expora dalam mendukung UMKM KP Naik Kelas; 2) PNM terkait dukungan program pemberdayaan UMKM KP; 3) Success story dari pengolah Bandeng New Citra; dan 4) Manajemen Perkoperasian dari Dinas Koperasi Prov. Jawa Tengah, dan success story dari Koperasi Produsen Citra Kina Raya.

Acara juga dirangkai dengan Layanan Terpadu Ditjen PDSPKP terkait konsultasi akses permodalan dari BNI dan PNM, perizinan berusaha, kelembagaan usaha, dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, dengan rincian : 1) 29 pelaku usaha mengurus SKP; 2) 3 pelaku usaha menambah kbli (10750 dan 10216) untuk proses pembuatan SKP; 3) 1 pelaku usaha membuat NIB; 4) 1 pelaku usaha merubah user dan password



Gambar 3. 29 Fasilitasi Akses Permodalan di Kota Semarang Jawa Tengah

Gambar 3.29 Fasilitasi Akses Permodalan di Kota Semarang Jawa Tengah

b. Temu fasilitasi akses pembiayaan kredit kelautan dan perikanan di Boyolali, 29 Februari 2024

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, penyuluh perikanan, serta pembudidaya lele dan pengolah produk hasil perikanan dari Kampung Lele di Kabupaten Boyolali. Acara bertujuan untuk memberikan edukasi literasi keuangan serta fasilitasi akses pembiayaan melalui inisiasi pembentukan klaster pembiayaan di kampung lele dan fasilitasi BNI Expora untuk memperkenalkan produk UMKM Bandeng Presto Bu Rita ke trade expo di mancanegara. Narasumber yang hadir berasal dari BNI terkait pembiayaan BNI Expora; PNM terkait program Mekaar dan pendampingan UMKM KP, dan success story dari UMKM Bandeng Presto Bu Rita.

Acara dirangkai dengan membuka gerai layanan konsultasi akses permodalan dari BNI dan PNM, perizinan berusaha, dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Potensi UMKM di Boyolali sebanyak 964 unit, 17 unit bergerak di sektor perikanan tersebar di 5 kecamatan. Volume produk yang dihasilkan sebanyak 1.442 ton/thn, dengan rata2 penambahan 2-3 UKM per tahun. Sebagai komitmen dari pemerintah kab. Boyolali utk pengembangan kampung lele, maka pada tahun 2024 Telah dianggarkan melalui DAK utk pembangunan balai benih di lokasi kampung lele. PT PNM juga berkomitmen untuk menginisiasi kampung lele sbg calon lokasi kampung madani.



Gambar 3. 30 Fasilitasi Akses Permodalan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program pada tahun 2024 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp3.300.000.000,-, hingga triwulan I anggaran yang terserap sebesar Rp340.538.195,- atau setara dengan 10,32% dari total anggaran. Dalam hal ini persentase penggunaan anggaran lebih besar daripada persentase realisasi capaian sebesar 5,84%, hal ini dikarenakan pada triwulan I kegiatan lebih difokuskan pada kegiatan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan kegiatan identifikasi.

IK8. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha (UMKM)

Fasilitasi kemitraan usaha merupakan kerja sama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha mikro kecil untuk mampu mengembangkan jaringan usahanya melalui kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha menengah besar. Fokus dari fasilitasi kemitraan usaha ini tersebar di seluruh bidang usaha sektor kelautan dan perikanan.

Capaian ini diperoleh dengan menghitung setiap UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir adalah pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah atau besar yang berminat dan/atau melakukan kemitraan usaha atau pelaku usaha skala mikro atau kecil yang difasilitasi dalam program sertifikasi produksi untuk menunjang kegiatan usaha.

Tabel 3. 9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi (UMKM) pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir (UMKM)	26	-	-	125	26	-	-	26	100	-	-	20,80

Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 125 UMKM. Capaian

output UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usahadan investasi hulu hilir pada Triwulan I tahun 2024 sebesar 26 UMKM yang terdiri dari 25 UMKM yang terfasilitasi kemitraan dan 1 UMKM yang terfasilitasi layanan perizinannya. Capaian ini setara dengan 100% dari target triwulan I sebanyak 26 UMKM dan sebesar 20,80% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 dari target 125 pelaku usaha. capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat metode perhitungan baru untuk IKU UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir yaitu dengan menambahkan jumlah pelaku usaha yang berminat/akan melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha yang melakukan kemitraan dalam rangka pengembangan usaha dan implementasi perizinan usaha dan jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraannya dengan startup perikanan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini sebagai berikut:

1. Fasilitasi Kemitraan Usahadan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Gresik

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama antara Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dengan Direktorat Usaha dan Investasi dan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP yang dilaksanakan di UPI Nilai Tambah dan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.

Capaian kegiatan kemitraan usaha ini sebagai berikut:

- Dalam rangka pemanfaatan UPI Bernilai Tambah yang telah dibangun oleh Pemerintah dalam Kawasan Perikanan Terpadu di Kabupaten Gresik, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu bersinergi dengan Direktorat Usaha dan Investasi beserta Dinas Perikanan Kab. Gresik menggelar kegiatan Bimtek bagi Operator Pemanfaatan UPI Bernilai Tambah dan Fasilitasi Kemitraan Usaha. Kegiatan yang dilaksanakan pada 24 Januari 2024 ini dilaksanakan di UPI Nilai Tambah dan Dinas Perikanan Kab. Gresik.
- Telah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara PT Gresik Migas Properti dan Pembudidaya (Achmad Najikh); dan PT Gresik Migas Properti dan APJI Reg. Jawa Timur yang disaksikan oleh Dinas Perikanan Kab. Gresik dan Tim Direktorat UI dan PBM beserta perwakilan pengurus APJI.

- Diharapkan melalui Kerjasama ini, UPI Bernilai Tambah yang telah dibangun dapat memberikan nilai manfaat dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar serta mendorong tumbuhnya sektor kelautan dan perikanan yang lebih baik.



Gambar 3. 31 Fasilitas Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Gresik

2. Fasilitas Kemitraan Usahadan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Purwakarta

Pada tanggal 16 Februari 2024 telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Ditjen PDSPKP (cq. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dan Direktorat Usaha dan Investasi) dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, Koperasi Agri Purwa Madhani (calon pengelola Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah), UKM Permata Gabus Alam dan PT Kapsulindo Nusantara. Rapat dilaksanakan di Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.

Output dari kegiatan ini adalah penandatanganan 2 MOU (Kesepakatan Bersama) antara PT Koperasi Agri Purwa Madhani dengan UKM Permata Gabus Alam dan PT Koperasi Agri Purwa Madhani dengan PT Kapsulindo Nusantara.



Gambar 3. 32 Fasilitas Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Purwakarta

3. Fasilitas Kemitraan Usahadan Investasi Hulu Hilir di Provinsi Banten

Untuk mendukung percepatan pembangunan dan keberlanjutan investasi sektor kelautan dan perikanan, Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan Fasilitas Kemitraan Usaha di Provinsi Banten;

Berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten untuk lokasi dan UPI yang akan dikunjungi. Identifikasi ke lapangan untuk meninjau dan berdiskusi langsung dengan para pelaku usaha pengolah Terasi dari Rebon Udang milik Pak Datim dari Kampung Legon Rt 06 dan RW 02 Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kab. Serang; Saat ini permintaan pasarnya masih mengandalkan dari permintaan lokal seperti pasar dan supplier serta konsumen langsung di wilayah Serang, Indramayu, Lampung. Adapun kendala yang dihadapi saat ini yaitu dimana harga jual bahan baku tinggi dan langka karena terpaut dengan musiman antara bulan Februari – April dan Juli – September. Sehingga tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Harga bahan baku rebon 4000-5000/kg komoditi rebung laut dan rebon Empang kisaran 25.000-30.000 per kg sedangkan Jenis Domas antara 40.000 – 50.000 per kg. Diharapkan kedepannya Pak Datim dapat memperluas permintaan pasar lainnya apabila ada penambahan modal usaha, yg disarankan melalui Pinjaman KUR dari Bank BRI dan masih berjalan sampai sekarang. Pak Datim juga menerima bantuan Cold Box dan Timbangan tahun 2022 dari Pemerintah. Diharapkan melalui kegiatan identifikasi ini, dapat dilakukan analisa kebutuhan para pelaku usaha untuk

pengembangan kemitraan antar pelaku usaha kelautan dan perikanan kedepannya khususnya di wilayah provinsi Banten.



Gambar 3. 33 Fasilitas Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Serang, Banten

4. Fasilitas Kemitraan Usahadan Investasi Hulu Hilir di Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Percepatan pembangunan dan keberlanjutan investasi sektor kelautan dan perikanan, Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan Fasilitas Kemitraan Usaha di Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dengan hasil sebagai berikut:

- PT Sorby International Medan (SIM) alamat kantor di Jl. Pulau Irian Kompl. Miel Nusantara I No. 3-AKIM, Saentis Percut Sei Tuan Desa/Kelurahan Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Bidang Usaha yang dikelola Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213, 10293, 46206)) dapat disampaikan melalui informasi dan data monev yg dilakukan langsung ke lokasi usaha, kapasitas terpasang: 150 Ton.
- PT Sorby International Medan (SIM) Deli Serdang adalah Perusahaan PMA selama tahun 2021 – 2023 akan tetapi pemodal asing keluar dan menjadi modal sendiri dan berubah menjadi PMDN otomatis ketika mengajukan kembali

perizinan berusaha berbasis risiko di OSS.



Gambar 3. 34 Fasilitas Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

5. Fasilitas Kemitraan Usahadan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Bogor

- Dalam rangka fasilitasi kemitraan usaha dan pelayanan publik Tim melakukan kegiatan komitmen kemitraan bersama Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Bogor yang berlokasi di Ruang Rapat Dinas pada tanggal 27 Maret 2024.
- Pada pertemuan tersebut hadir mewakili Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Bogor yaitu Ketua Tim Pelayanan Usaha dan Hasil Perikanan, dan 9 (Sembilan) UMKM pengolah dan pemasar hasil perikanan di wilayah Kab. Bogor yaitu UMKM Yetti Fitria, Pempek Bintang Mas, Sulis Culinary, Bakulan Cibungsu, Pempek Oslan, Papa Opanz, Bandeng Atul, Restu Ibu, dan MT Food.
- Selain itu diskusi dan sharing session terkait komitmen kemitraan usaha yang akan dibangun antar pelaku usaha tersebut. Adapun pada sesi diskusi ini para pelaku usaha yang merupakan UMKM pengolah dan pemasar banyak yang bertanya terkait bentuk Kerjasama/kemitraan, dan tata cara pemenuhan perizinan/legalitas usaha.
- Hal yang dapat ditindaklanjuti dari pertemuan tersebut yaitu dimana pelaku usaha siap untuk bermitra dan khususnya masih terdapat banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin P-IRT, sehingga hal tersebut dapat menjadi tindaklanjut KKP dalam hal ini Timja Pelayanan dan Kemitraan Usaha untuk selenggarakan fasilitasi kemitraan dan perizinan usaha untuk SPP IRT Bersama Dinas Kesehatan Kab. Bogor
- Melalui pertemua ini juga pelaku usaha telah menandatangani nota kesepahaman sebagai komitmen kemitraan untuk dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

- Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat dilakukan Analisa kebutuhan para pelaku usaha untuk dibangun kemitraan antar pelaku usaha kelautan dan perikanan kedepannya.



Gambar 3. 35 Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Bogor, Jawa Barat

6. Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Dalam rangka kegiatan kemitraan usaha telah dilaksanakan identifikasi kemitraan pada tanggal 27 s/d 29 Maret 2024 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan hasil sebagai berikut :

- Telah dilakukan identifikasi dan kemitraan usaha antara para pelaku usaha perikanan di Binuangeun Kabupaten Lebak. Di Binuangeun Kabupaten Lebak terdapat Tempat Pelelangan Ikan terbesar di wilayah Banten Selatan. Pelaku usaha perikanan di Binuangeun adalah nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan.
- Di Binuangeun ini telah berdiri Koperasi Mina Muara Sejahtera yang telah banyak berkiprah dalam pengembangan UMKM perikanan. Jumlah anggota koperasi sebanyak 620 orang. Bidang usaha dari koperasi ini adalah usaha pemasaran ikan dan simpan pinjam. Selama ini Koperasi sudah banyak melakukan pendampingan, pelatihan, pembiayaan usaha dan pengembangan infrastruktur perikanan dan melakukan pemasaran ikan baik ikan segar maupun ikan olahan dari para anggota nya.
- Koperasi ini juga telah melakukan kerjasama dengan asosiasi nelayan, industri pengolahan ikan dan berbagai perusahaan.
- Pada kesempatan tersebut telah dilakukan kemitraan usaha sebagai berikut :

- a. Kemitraan antara Yeri Maulana a.n **Koperasi Mina Muara Sejahtera** (Jl. Karang Malang No. 1 Desa Muara, Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak) dengan **Marliah** (Ketua Poklhasr Mentari yang beralamat Kampung Nelayan RT. 008 RW. 002 Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak .
 - b. Kemitraan antara Yeri Maulana a.n **Koperasi Mina Muara Sejahtera** (Jl. Karang Malang No. 1 Desa Muara, Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak) dengan **Reni Anggraeni** (pemilik usaha pengolahan yang beralamat di Kp. Duraen RT. 27 RW. 007 Desa Muara Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak)
 - c. Kemitraan antara Yeri Maulana a.n **Koperasi Mina Muara Sejahtera** (Jl. Karang Malang No. 1 Desa Muara, Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak) dengan **Ujang** (pemilik usaha yang beralamat di Kampung Karang Kencana RT. 03 RW. 001 Desa Muara Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.
 - d. Kemitraan antara Yeri Maulana a.n **Koperasi Mina Muara Sejahtera** (Jl. Karang Malang No. 1 Desa Muara, Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak) dengan **Ilas Sulasiah** (pemilik Usaha yang beralamat di Kampung Dayeuh RT. 011 RW. 003 Desa Muara, ecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak
 - e. Kemitraan antara Yeri Maulana a.n **Koperasi Mina Muara Sejahtera** (Jl. Karang Malang No. 1 Desa Muara, Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak) dengan **Bedah** (pemilik usaha pengolahan ikan yang beralamat di Kampung Karang Malang RT. 001 RW. 001, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.
- Kemitraan usaha ini diharapkan dapat terus berjalan dan diharapkan dapat mengembangkan usaha bagi para pihak yang bermitra.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp186.645.277,- atau setara dengan 10,97% dari total pagu sebesar Rp1.701.000.000,-, Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 20,80% daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 10,97%.

3.2.6 Sasaran Strategis 6

Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

IK9. Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan

Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi didefinisikan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dalam lingkup penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada Direktorat Usaha dan Investasi. Untuk mencapai capaian tersebut tenaga kerja yang dihitung adalah setiap tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi ataupun tenaga kerja yang tidak langsung pada proses produksi pada masing-masing usaha mikro kecil dan menengah sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan fasilitasi sosialisasi dan pembinaan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Usaha dan Investasi.

Tabel 3. 10 Ikhtisar Pencapaian Indikator Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi	940	4794	940	10770	1106	5044	-	1106	117,65	-	-	10,26

Pada tahun 2024, target tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi sebanyak 10.770 orang sedangkan target pada triwulan I sebanyak 940 orang. Capaian realisasi yang telah dihitung oleh Direktorat Usaha dan Investasi adalah sebesar 1.106 orang tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan baik secara langsung maupun tidak langsung atau setara dengan 117,65%.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan Direktorat Usaha dan Investasi untuk mendukung capaian ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya di Sampang dan Demak

Pra pembentukan lembaga usaha hasil KP dalam rangka peningkatan kelembagaan pada tanggal 25 Januari 2024 di Kabupaten Sampang. Dari hasil pertemuan yang dilakukan ditetapkan bahwa nama calon koperasi yang akan dibentuk adalah Koperasi Lele Mambo Berseri dengan jumlah anggota 15 orang. Jenis Koperasinya adalah koperasi konsumen.

Peningkatan Kelembagaan usaha hasil KP di Kabupaten Jepara dan Jepara pada tanggal 16-19 Januari 2024. Peningkatan kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan di Kabupaten Jepara merupakan tindak lanjut dari rapat Inisiasi pembentukan lembaga usaha tanggal 15 Januari 2024 untuk melihat secara langsung kesiapan Forum Komunikasi Rajungan Nusantara dalam membentuk lembaga usaha. Selain itu juga dilakukan kunjungan ke beberapa pelaku usaha KP dan koperasi perikanan yang sudah terbentuk di Kabupaten Demak dalam rangka pendampingan yaitu: Poklahsar Ayu Lestari, Koperasi Asap Indah Wonosari, Koperasi Pijar Mas, dan Koperasi Sri Say Adem,

2. Fasilitasi kewirausahaan di Jepara, Demak, Kendal, Sragen ;

Dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Baru, serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Direktorat Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP melaksanakan kegiatan pemberdayaan usaha melalui UMKM Naik Kelas Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Sleman pada tanggal 4-8 Maret 2024.

Kegiatan di Kabupaten Jepara dan dihadiri 10 UMKM Dengan didampingi dinas perikanan kabupaten Jepara. Terdapat 4 UMKM yang bisa di target kan untuk naik kelas.

Kegiatan di Kabupaten Kendal dengan mengidentifikasi sebanyak 6 UMKM di bidang pengolahan perikanan. Dengan didampingi dinas perikanan kabupaten Kendal. Terdapat 6 UMKM yang bisa di target kan untuk naik kelas dari kelas mikro menuju ke kelas kecil

Kegiatan di Kabupaten Sleman dengan mengidentifikasi sebanyak 2 UMKM di bidang pengolahan perikanan. Dengan didampingi dinas perikanan kabupaten Kendal. Terdapat 2 UMKM yang bisa di target kan untuk naik kelas

3. Bimbingan teknis kewirausahaan dan pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI telah dilaksanakan di Kabupaten/Kota Kediri, Palembang, Kupang, Majalengka, Banyumas, Sumbawa, Bogor, Lampung Tengah, Pinrang, Sambas, Tulang Bawang Barat, Jombang, Karawang, Tebo, Maluku Tengah; dan

4. Fasilitasi pemberdayaan usaha di Semarang dan Lampung tengah.

Temu fasilitasi akses pembiayaan kredit kelautan dan perikanan di Semarang, 27 Februari 2024. Acara dibuka oleh Direktur Usaha dan Investasi secara daring, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan DKP Kota Semarang, Kab Semarang, Kab Kendal, penyuluh perikanan, serta UMKM perikanan dari Kota Semarang, Kab Semarang, Kendal, dan Demak. Acara bertujuan untuk memberikan edukasi literasi keuangan serta fasilitasi akses pembiayaan dan kelembagaan usaha KP dalam rangka mendorong UMKM KP naik kelas kepada para pelaku UMKM di Jawa Tengah.

Kegiatan fasilitasi pembiayaan di lampung tengah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan dihadiri oleh Anggota DPR-RI, perwakilan pejabat dari Ditjen PDSPKP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Setempat, Lembaga Keuangan Setempat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat, UMKM Terbaik setempat. Hadir sebagai peserta pelaku usaha yang terdiri atas pembudidaya ikan air tawar, nelayan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan setempat.

5. Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Bogor, Gresik, Deli Serdang, Banten dan Purwakarta;

Dalam rangka fasilitasi kemitraan usaha dan pelayanan publik Tim melakukan kegiatan komitmen kemitraan bersama Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Bogor yang berlokasi di Ruang Rapat Dinas pada tanggal 24 Januari 2024 di Gresik, 16 Februari di Purwakarta, 27 Maret 2024 di Bogor, dan 27 s/d 29 Maret 2024 di Kabupaten Lebak.

Pada pertemuan tersebut dihadiri Dinas Perikanan dan Peternakan Provinsi/Kab/Kota, UMKM pengolah dan pemasar hasil perikanan di wilayah-wilayah tersebut.

Melalui pertemuan ini juga pelaku usaha telah menandatangani nota kesepahaman sebagai komitmen kemitraan untuk dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat dilakukan Analisa kebutuhan para pelaku usaha untuk dibangun kemitraan antar pelaku usaha kelautan dan perikanan kedepannya.

3.2.7 Sasaran Strategis 7

Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

IK10. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Tabel 3. 11 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	-	75	-	75	-	82,33	-	-	-	109,77	-	-

Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi tahun 2024 ditargetkan sebesar 75. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024.

Dalam rangka pencapaian target dimaksud, Direktorat Usaha dan Investasi telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam upaya pemenuhan indikator kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu dengan melibatkan seluruh pegawai Direktorat Usaha dan Investasi untuk menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal pada periode sebelumnya, melalui rapat koordinasi intensif pada masing-masing area dengan dukungan dari Sekretariat Ditjen PDSPKP, serta melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian WBK.

IK11. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bagian SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKP. Kegiatan pendukung untuk IKU ini adalah dalam bentuk pengembangan SDMA serta kegiatan monitoring dan evaluasi pada SDMA.

Tabel 3. 12 Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	-	83,2	-	87	-	92,11	-	-	-	110,71	-	-

Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Direktorat Usaha dan Investasi) tahun 2024 ditargetkan sebesar 83,2. Indikator kinerja ini bersifat semesteran sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha dan Investasi belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada semester I dan semester II tahun 2024.

IK12. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah evaluasi pengukuran kinerja dan revidi laporan kinerja bersama APIP yang pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum dapat dihitung nilai capaiannya pada triwulan berjalan.

Tabel 3. 13 Ikhtisar Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	-	80,5	-	84	-	83,30	-	-	-	103,48	-	-

Nilai PM SAKIP Unit Eselon II diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi pada aplikasi Kinerjaku KKP yang mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2024 ditargetkan 80,5. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode

ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024.

IK13. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Ditjen PDSPKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 3. 14 Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (persentase)	-	100	-	100	-	100	-	-	-	100	-	-

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2024 ditargetkan 100. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024.

IK14. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

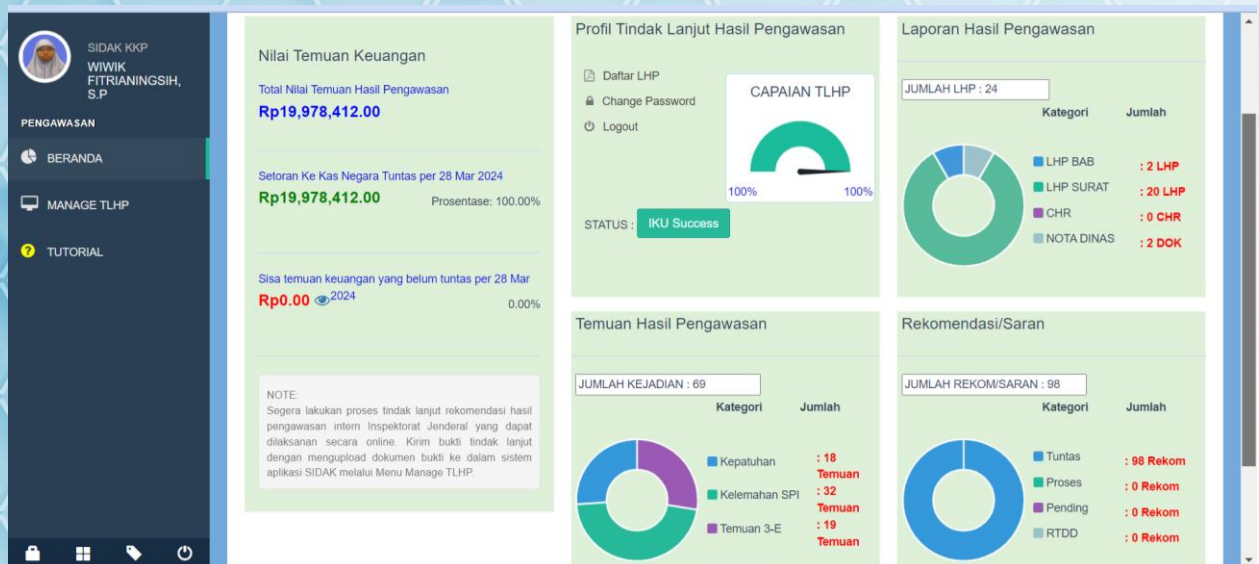
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit. Pengukuran capaian

persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dilakukan setiap triwulan.

Pada Triwulan I 2024, Direktorat Usaha dan Investasi dengan difasilitasi oleh Ditjen PDSPKP telah mengikuti pembahasan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan pada tanggal 15 Desember di Raiser Ikan Hias, Cibinong, terhadap keseluruhan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan I 2024, Berdasarkan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan Itjen KKP melalui Aplikasi SIDAK, tindak lanjut hasil pengawasan sampai dengan Triwulan I 2024 mencapai 100%, dimana seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP atau dapat dilihat pada Aplikasi SIDAK dengan periode perhitungan triwulanan.

Tabel 3. 15 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi (%)	80	75	75	80	100	100	100	100	125	133,33	120	120



Gambar 3. 36 Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 31 Maret 2024

IK15. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikutkan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK.

Tabel 3. 16 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi	-	1	-	1	-	2	-	-	-	200	-	-

Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat Usaha dan Investasi tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1 inovasi. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024.

Capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik yang disusun oleh Ditjen PDSPKP, diseleksi dan diajukan ke Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik oleh Koordinator Reformasi. Pada tahun 2024, nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 75. Capaian pada Indikator kinerja ini adalah 79,79 setara dengan 106,39%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Kriteria Inovasi Pelayanan Publik mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Sedangkan kelompok inovasi mencakup: kelompok umum dan kelompok khusus. Perhitungan perhitungan capaian untuk aspek penilaian kelompok umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), signifikansi (25%), kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (5%), adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%) dan kolaborasi pemangku kepentingan (5%).

Aspek penilaian kelompok khusus mencakup pembaruan/peningkatan inovasi (25%), adaptabilitas (20%), penguatan keberlanjutan (25%) dan evaluasi (30%).

IK16. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur sasaran kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi. Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (MP) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Portal *Collaboration Office* (Coofis) di laman <https://portal.kkp.go.id> periode Triwulan I Tahun 2024, yang pengukurannya dilakukan setiap triwulan. Capaian kinerja persentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 17 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi (%)	94	92	92	94	133,33	133,33	-	-	141,84	144,92	-	141,84

Pada triwulan I tahun 2024, persentase unit kerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar mencapai

133,33% atau setara dengan 141,84% terhadap target triwulan I tahun 2024 sebesar 94%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya target indikator kinerja ini mengalami kenaikan sebesar 2,17% dari capaian tahun 2023 sebesar 92%.

Pengukuran capaian Manajemen Pengetahuan pada Triwulan I Tahun 2024 menggunakan *Platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>). Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain Optimalisasi penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan *platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>) .

IK17. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Pada tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi menetapkan target persentase realisasi anggaran sebesar 95 Persen. Adapun capaian indikator ini sebagai berikut.

Tabel 3. 18 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi (%)	-	95	-	93,75	-	99	-	-	-	104,21	-	-

Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2024 ditargetkan 93,75%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024. Namun dalam rangka memenuhi indikator kinerja tersebut realisasi anggaran Direktorat Usaha dan Investasi sebesar Rp 3.105.090.448,- dari total anggaran sebesar Rp17.806.985.000,- atau setara dengan 17,44%.

IK18. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan

Investasi adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi menetapkan target Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi sebesar 77,5 Persen. Adapun capaian indikator ini sebagai berikut.

Tabel 3. 19 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	-	77,5	-	77,5	-	79,69	-	-	-	102,82	-	-

Penilaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi dilaksanakan tahunan dimana penilaian dilakukan di akhir triwulan IV sehingga pada triwulan I belum dapat diketahui tingkat capaiannya.

Dalam rangka mencapai target diatas, Direktorat Usaha dan Investasi telah mengikuti beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Rapat penyusunan laporan tahunan PBJ lingkup Ditjen PDSPKP Tahun Anggaran 2023 tanggal 17 sd 18 Januari 2024 di Raiser Ikan Hias Cibinong Kabupaten Bogor Tujuan rapat melakukan penyusunan laporan tahunan PBJ lingkup Ditjen Ta.2023
- b. Rapat Update RUP dan Pencatatan Realisasi Paket PBJ Tahun Anggaran 2024 lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 29 - 30 Januari 2024 di Raiser Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat. Tujuan Rapat adalah untuk melakukan update Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP).
- c. Rapat Koordinasi dan Brainstorming Percepatan PBJ Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 12 Februari 2024 di GMB 3 Lt 15, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuan rapat adalah untuk koordinasi terkait percepatan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP.

- d. Rapat Update Rencana Umum Pengadaan (RUP) Lingkup Ditjen PDSPKP pada Aplikasi SIRUP LKPP dan Pencatatan Realisasi Paket pada Aplikasi LPSE pada tanggal 13,15, dan 16 Februari 2024 di Ruang Rapat Mini Cinema Raiser Ikan Hias Cibinong Kabupaten Bogor. Tujuan rapat update rencana umum pengadaan (RUP) pada SIRUP LKPP dan Pencatatan Realisasi di aplikasi LPSE adalah terlaksananya tertib administrasi perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan tersedianya pelaporan secara online tentang perencanaan RUP Lingkup Ditjen PDSPKP tahun anggaran 2024.
- e. Rapat Koordinasi PBJ dengan Pejabat Pengadaan Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada tanggal 27 Februari 2024 di Ruang Rapat Lantai 2, Wisma Glacilaria, Pulogadung. Tujuan Rapat adalah untuk melakukan pembahasan terhadap Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa dengan adanya Penetapan JF Fungsional PBJ dari Biro Umum dan PBJ sebagai pejabat pengadaan di Ditjen PDS, Kewaj dan Usulan Satudatabase PBJ lingkup Ditjen PDS;
- f. Rapat Koordinasi PBJ Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP pada tanggal 28 Februari 2024 di Ruang Rapat Lantai 2, Wisma Glacilaria, Pulogadung. Tujuan Rapat adalah untuk melakukan pembahasan terhadap Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa dengan adanya Penetapan JF Fungsional PBJ dari Biro Umum dan PBJ sebagai pejabat pengadaan di Ditjen PDS dan Usulan Satudatabase PBJ lingkup Sekretariat Ditjen PDS Pengadaan Barang dan Jasa dengan adanya Penetapan JF Fungsional PBJ dari Biro Umum dan PBJ sebagai pejabat pengadaan di Ditjen PDS dan Usulan Satudatabase PBJ lingkup Sekretariat Ditjen PDS;
- g. Rapat Penyiapan dokumen reuiu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ Tw I Tahun 2024 pada tanggal 4 - 5 Maret 2024 di Raiser Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat. tujuan rapat adalah melakukan Penyiapan dokumen reuiu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ Tw I Tahun 2024.
- h. Rapat Penyeragaman Pemaketan RUP pada Aplikasi SiRUP lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada tanggal 15 Maret 2024 di Ruang Rapat Biro Umum dan PBJ, Gedung Mina Bahari 1 Lantai 3, DKI Jakarta. Tujuan Rapat adalah untuk membahas rencana pembuatan dashboard otomasi data RUP dan Realisasi SAKTI.

- i. Rapat Koordinasi Percepatan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada tanggal 21 Maret 2024 di Ruang Rapat Branding, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 15, DKI Jakarta. Tujuan Rapat adalah untuk melakukan update progress pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkup Ditjen PDSPKP.

Rapat Update RUP dan Pencatatan Realisasi Paket PBJ Tahun Anggaran 2024 lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 26 s/d 28 Maret 2024 di Raiser Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat. Tujuan Rapat adalah untuk melakukan update Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) setelah revisi POK terakhir dan pencatatan realisasi Paket PBJ non Tender dan swakelola Tahun Anggaran 2024 pada Aplikasi LPSE (AMEL);

19 Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi

Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern Ditjen PDSPKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP diukur melalui pemenuhan beberapa indikator berikut:

- a. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025;
 - b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan I tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
 - c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan I Tahun 2024;
 - b. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 3. 20 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	-	77,5	-	80	-	97,50	-	-	-	125,80	-	-

Pada tahun 2024, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Setditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 80%. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Indikator Kinerja yang sifatnya tahunan, dimana penilaian capaiannya akan dilakukan oleh APIP pada akhir tahun.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Pemindahtanganan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP melalui kegiatan yang terdiri dari :
 - Penghapusan alat laboratorium dengan mekanisme penghapusan barang melalui lelang di KPKNL Bogor pada tanggal 16 Januari 2024, dengan nilai penjualan BMN sebesar Rp11,963,313,-
 - Rapat percepatan proses Hibah PIH Pejompongan kepada Pemda DKI Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024. Tujuan pertemuan adalah menyusun langkah-langkah tindak lanjut percepatan proses hibah PIH Pejompongan dan penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP perihal setoran PNBK yang menjadi kewajiban PT Putra Kirana Sentosa.
 - Rapat dalam rangka penghapusan BMN berupa alat pengolah data Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 26 Februari 2024
- b. Penatausahaan BMN Sakter Sekretariat Ditjen PDSPKP dan Sakter Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan yang terdiri dari :
 - Inventarisasi BMN *Cold Storage* 1000 ton Muara Baru pada tanggal 13 Januari 2024.

- Inventarisasi BMN alat pengolahan gurita di Kota Makassar pada tanggal 6 Februari 2024
 - Inventarisasi BMN *Cold Storage* 2000 ton Muara Baru pada tanggal 13 Februari 2024
 - Inventarisasi BMN Pasar Ikan Modern Muara Baru pada tanggal 15 s.d 16 Februari 2024
 - Penyelesaian transfer online BMN Raiser Ikan Hias Cibinong dari Sakter BBP3KP ke Anak Satker Direktorat Pemasaran pada tanggal 12 Januari 2024
 - Rapat percepatan BAST BMN kendaraan berpendingin dari Anak Satker Direktorat Logistik kepada BBP3KP, pada tanggal 21 Februari 2024
 - Rapat percepatan penghapusan aset BMN henti guna Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 20 Februari 2024
 - Rapat Penetapan Status Penggunaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 20 Maret 2024, dan dilanjutkan dengan rapat penginputan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 27 s.d 28 Maret 2024.
- c. Pendayagunaan BMN melalui Pemanfaatan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP melalui kegiatan yang terdiri dari :
- Pengajuan permohonan sewa ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. KPKNL Jakarta II aset BMN berupa *Cold Storage* 2000 ton dari Biro Keuangan KKP kepada DJKN Kemenkeu c.q KPKNL Jakarta II pada tanggal 1 Februari 2024
 - Rapat Pemanfaatan BMN Ditjen PDSPKP yang dikerjasamakan dengan PT Perindo pada tanggal 12 Februari. Rapat dipimpin oleh Direktur Jenderal PDSPKP dan dihadiri oleh Itjen KKP, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, Kepala Biro Keuangan KKP, dan seluruh perwakilan Direktorat dari Ditjen PDSPKP.
 - Penandatanganan perjanjian sewa Barang Milik Negara Berupa *Cold Storage* 2000 Ton dan Sarana Pendukungnya di Muara Baru Dalam Masa Transisi dan Perjanjian Sewa Sewa Gedung Bangunan Pasar Ikan Modern Muara Baru. DKI Jakarta Dalam Masa Transisi pada tanggal 16 Februari 2024

- Penilaian tarif sewa BMN Cold Storage 2000 ton oleh tim penilai dari Kementerian Keuangan RI c.q DJKN c.q. KPKNL Jakarta II pada tanggal 13 Februari 2024

Koordinasi dan Konsultasi kepada Seksi Piutang Negara KPKNL Jakarta II perihal piutang negara yang belum dibayarkan oleh PT Putra Kirana Sentosa (PT PKS) pada tanggal 5 Maret 2024

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan I Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Dalam melaksanakan misi pembangunan kelautan dan perikanan yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan melalui berbagai kebijakan yang telah ditempuh serta program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode triwulan I tahun 2024, Direktorat Usaha dan Investasi telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dan sesuai target.

Dalam masa *recovery* setelah pandemi Covid-19 berdampak pada adanya perubahan kebijakan pemerintah yang menyesuaikan dengan kondisi global yang mulai kembali seperti sebelum adanya pandemi covid-19, yang menyebabkan adanya penyesuaian kegiatan pada periode awal di tahun 2024. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Usaha dan Investasi terus melaksanakan koordinasi intensif dengan instansi terkait. Diharapkan pada periode berikutnya akan terjadi percepatan pelaksanaan kegiatan, sehingga Indikator Kinerja dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

4.2. Rekomendasi

Secara umum, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pencapaian Indikator Kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode mendatang antara lain:

1. Dalam penyusunan peluang investasi *ready to offer* perlu dilaksanakan perlu dilaksanakan identifikasi Peluang Investasi Komoditas Tuna
2. Rencana pelaksanaan *business forum* pada triwulan II tahun 2024

3. Sosialisasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta DPMPTSP terkait regulasi terbaru tentang perizinan berusaha;
4. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan melalui kredit program di Kabupaten Boyolali, Tuban, Banyuwangi dan Bali
5. Melaksanakan koordinasi dengan Kelompok Kerja Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan nilai pembiayaan sektor kelautan dan perikanan.
6. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait percepatan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan atas rekomendasi pada triwulan IV 2023, sebagai berikut:

No	Rekomendasi Triwulan IV 2023	Tindak Lanjut Pada Triwulan I 2024
1	Dalam penyusunan peluang investasi <i>ready to offer</i> untuk mendukung pengembangan bidang hilir di Wakatobi, Sulawesi Tenggara perlu dilaksanakan penguatan kelembagaan, koordinasi lebih lanjut antara Pemprov Sulawesi Tenggara dan Pemkab Wakatobi, sinergitas dengan Direktorat Teknis lain lingkup Ditjen PDSPKP untuk pengembangan sarana dan prasarana serta kegiatan non fisik yang diperlukan yaitu penumbuhan wirausaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, kemitraan usaha, perluasan akses pasar (terutama untuk poklhasar eksisting), bimtek pengolahan untuk istri nelayan, akses distribusi/logistik ke luar Wakatobi.	Telah dilaksanakan Diskusi wakatobi – ready dengan tim efektif dan indekstat. Pada tanggal 14 November 2023 dengan hasil strategi peningkatan investasi rumput laut di Wakatobi melalui W i-Ready
2	Sosialisasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta DPMPTSP terkait regulasi terbaru tentang perizinan berusaha;	Telah dilaksanakan Sosialisasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta DPMPTSP terkait regulasi terbaru tentang perizinan berusaha pada tanggal 27 Maret 2024 di Bogor, 27 Februari 2024 di Semarang, 29 Februari di Boyolali dan 7 Maret 2024 di Deli Serdang
3	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi akses pembiayaan sektor kelautan dan perikanan melalui kredit program di Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pekalongan pada tanggal 10 Oktober 2023, bertempat di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang dihadiri oleh

		Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan
4	Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Kelautan terkait database pelaku usaha kelautan dan perikanan di aplikasi SIKP dan data kredit sektor kelautan dan perikanan.	Terlaksananya rapat koordinasi data antara Ditjen PDSPKP dengan OJK dan Kemenkeu pada tanggal 17 Oktober 2023
5	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait percepatan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan.	selama periode triwulan I Januari-Maret) 2024 telah dilaksanakan Bimbingan teknis kewirausahaan dan pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI telah dilaksanakan di Kabupaten/Kota Kediri, Palembang, Kupang, Majalengka, Banyumas, Sumbawa, Bogor, Lampung Tengah, Pinrang, Sambas, Tulang Bawang Barat, Jombang, Karawang, Tebo, Maluku Tengah

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Catur Sarwanto**
Jabatan : Direktur Usaha dan Investasi

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Budi Sulistiyo**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan


Budi Sulistiyo

PIHAK PERTAMA,
Direktur Usaha dan Investasi


Catur Sarwanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan	1.	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5
		2.	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8
2.	Tersedianya dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i>	3.	Dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i> (Dokumen)	4
3.	Terlaksananya promosi usaha dan investasi	4.	Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	4
4.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan	5.	Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	45
5.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha	6.	Wirusaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)	875
		7.	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha (UMKM)	2.565
		8.	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha (UMKM)	125
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	9.	Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (Orang)	10.770
7.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi	10.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	75
		11.	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)	87
		12.	Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)	84

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	13. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Usaha dan Investasi (%)	100
	14. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	80
	15. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)	1
	16. Persentase unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	94
	17. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)	93,75

DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. 000)
1.	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	22.723.500
Total Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2024		22.723.500

Jakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

PIHAK PERTAMA,
Direktur Usaha dan Investasi



Catur Sarwanto

Lampiran 2.

Memorandum penyampaian capaian dan data dukung laporan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM
Nomor 345/DJPDSPKP.2/TU.140/IV/2024

Yth. : Direktur Jenderal PDSPKP
Dan : Direktur Usaha dan Investasi
Hal : Penyampaian Realisasi Capaian IKU Level II Direktorat Usaha dan
Investasi dan Realisasi Anggaran Periode Triwulan I Tahun 2024
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 22 April 2024

Dalam rangka pemenuhan pelaporan kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan realisasi capaian IKU dan anggaran yang menjadi tanggung jawab Direktorat Usaha dan Investasi yang telah dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan

Kegiatan promosi usaha dan investasi bertujuan untuk menarik minat investasi di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan perluasan usaha. Capaian kinerja promosi usaha dan investasi pada triwulan I tahun 2024 sebanyak 1 kegiatan promosi yaitu "Indonesia Marine and Fisheries Business and Investment Forum (IMFBF) 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2024, sehingga secara akumulatif sampai dengan triwulan I tahun 2024 telah tercapai sebanyak 1 kegiatan atau tercapai 25% dari target tahun 2024 yakni 4 kegiatan.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp544.772.078,- atau setara dengan 24,14% dari total pagu sebesar Rp2.256.532.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 25,00%, lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 24,14%.

2. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya

Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah ditingkatkan dan dibina kapasitasnya sampai dengan triwulan I tahun 2024 terealisasi sebanyak 4 lembaga usaha, atau setara 100% jika dibandingkan dengan target Triwulan I tahun 2024 sebanyak 4 lembaga, dan apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 maka telah tercapai 8,88% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 45 lembaga. Adapun lembaga usaha yang telah ditingkatkan kapasitasnya pada triwulan I Tahun 2024, yaitu:

- 1) Koperasi Lele Mambo Berseri di Kabupaten Sampang (peningkatan kapasitas lembaga);

- 2) Koperasi Asap Indah Wonosari di Kabupaten Demak (penguatan kapasitas lembaga);
- 3) Koperasi Pijamas di Kabupaten Demak (penguatan kapasitas lembaga); dan
- 4) Koperasi Sri Say Dem di Kabupaten Demak (penguatan kapasitas lembaga).

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp146.161.786,- atau setara dengan 7,90% dari total pagu sebesar Rp1.850.000.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 8,88% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 7,90%.

3. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina

Jumlah wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebanyak 150 UKM/wirausaha atau setara 100% dari target triwulan I dan sebesar 17,14% jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebanyak 875 UKM/wirausaha. Capaian tersebut terdiri dari 100 UKM/wirausaha yang difasilitasi melalui kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Baru dan 50 UKM/wirausaha dari kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Pembiayaan.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp1.794.651.042,- atau setara dengan 23,70% dari total pagu sebesar Rp7.572.500.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp18.921.353,-. Dalam hal ini persentase penggunaan anggaran lebih besar daripada persentase realisasi capaian sebesar 17,14%, hal ini dikarenakan pada triwulan I kegiatan lebih difokuskan pada kegiatan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan kegiatan identifikasi.

4. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha

Capaian indikator kinerja ini terdiri dari Jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program dan jumlah UMKM Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan layanan Gisela, capaian sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah 150 UMKM atau setara dengan 100% dibandingkan dengan target triwulan I dan apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 maka persentase capaian sebesar 5,85%.

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja ini pada tahun 2024 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp3.300.000.000,-, hingga triwulan I anggaran yang terserap sebesar Rp340.538.195,- atau setara dengan 10,32% dari total anggaran. Dalam hal ini persentase penggunaan anggaran lebih besar daripada persentase realisasi capaian sebesar 5,84%, hal ini dikarenakan pada triwulan I kegiatan lebih difokuskan pada kegiatan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan kegiatan identifikasi.

5. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir

Realisasi jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah 26 UMKM, capaian ini terdiri dari 25 UMKM yang terfasilitasi kemitraan usaha dan investasi dan 1 pelaku usaha yang difasilitasi pelayanan usaha dan investasinya. Nilai persentase capaian ini setara dengan 100% dari target triwulan I atau jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 125 UMKM maka persentase capaiannya sebesar 20,80%.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp186.645.277,- atau setara dengan 10,97% dari total pagu sebesar Rp1.701.000.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 20,80% daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 10,97%.

6. Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan

Capaian indikator kinerja ini terdiri dari tenaga kerja yang dihitung adalah setiap tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi ataupun tenaga kerja yang tidak langsung pada proses produksi pada masing-masing usaha mikro kecil dan menengah sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan fasilitasi sosialisasi dan pembinaan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Realisasi yang telah dihitung oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah sebesar 1.106 orang tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan baik secara langsung maupun tidak langsung atau setara dengan 117,65% dari target triwulan I sebanyak 940 orang, apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 10.770 orang maka persentasenya sebesar 10,26%.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Dirjen lebih lanjut kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik
Catur Sarwanto

Tembusan
Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP

Lampiran 3

Daftar lembaga usaha yang telah ditingkatkan kapasitasnya :

1. Koperasi Lele Mambo Berseri di Kabupaten Sampang ;
2. Koperasi Asap Indah Wonosari di Kabupaten Demak;
3. Koperasi Pijarmas di Kabupaten Demak; dan
4. Koperasi Sri Say Dem di Kabupaten Demak.

Lampiran IV :

Data Dukung UMKM yang mendapatkan fasilitasi Kemitraan

No.	Nama Pelaku Usaha	Keterangan	Alamat	Kegiatan
1	Achmad Najikh	Petambak Bandeng	Gresik	Fasilitasi kemitraan
2	PT Gresik Migas Properti	PMDN	Gresik	Fasilitasi kemitraan
3	Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia	Asosiasi	Surabaya	Fasilitasi kemitraan
4	Koperasi Agri Purwa Madani	Koperasi	Purwakarta	Fasilitasi kemitraan
5	PT Kapsulindo Nusantara	PMDN	Cibinong	Fasilitasi kemitraan
6	UKM Permata Gabus Alam	UKM	Purwakarta	Fasilitasi kemitraan
7	Poklhasar Terasi Makmur Jaya	UKM	Serang	Fasilitasi kemitraan
8	PT Putri Manalu Bersaudara	PMDN	Medan	Identifikasi kemitraan
9	PT Sorby Internasional	PMDN	Medan	Identifikasi kemitraan
10	Yetti Fitaria	UMKM	Kab. Bogor	Identifikasi kemitraan
11	Pempek Bintang Mas	UMKM	Kab. Bogor	Identifikasi kemitraan
12	Sulis Culinary	UMKM	Kab. Bogor	Identifikasi kemitraan
13	Bakulan Cibungsu	UMKM	Kab. Bogor	Identifikasi kemitraan
14	Pempek Otslan	UMKM	Kab. Bogor	Identifikasi kemitraan
15	Papa Opanz	UMKM	Kab. Bogor	Identifikasi kemitraan
16	Bandeng Atul	UMKM	Kab. Bogor	Identifikasi kemitraan
17	Restu Ibu	UMKM	Kab. Bogor	Identifikasi kemitraan
18	MT Food	UMKM	Kab. Bogor	Identifikasi kemitraan
19	Koperasi Mina Muara Sejahtera	Koperasi	Lebak	Fasilitasi kemitraan
20	Poklhasar Karya Mandiri	UMKM	Lebak	Fasilitasi kemitraan
21	Poklhasar Mentari Lebak	UMKM	Lebak	Fasilitasi kemitraan
22	PT ARUNA	UMKM	Lebak	Fasilitasi kemitraan
23	Reni Anggraeni	UMKM	Lebak	Fasilitasi kemitraan
24	Ujang Lebak	UMKM	Lebak	Fasilitasi kemitraan
25	Ilas Sulasiah	UMKM	Lebak	Fasilitasi kemitraan